

**KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP PEMENANGAN BUPATI WAY KANAN
PADA PEMILUKADA TAHUN 2015**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Bidang Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

Tri Sektiono

NPM. 1431040096

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018M**

**KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP PEMENANGAN BUPATI WAY KANAN
PADA PEMILUKADA TAHUN 2015**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

dalam Bidang Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**Tri Sektiono
NPM. 1431040096**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Dr. M. Sidi Ritauddin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PEMENANGAN BUPATI WAY KANAN PADA PEMILUKADA WAY KANAN

Oleh:

Tri Sektiono

Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi Partai Demokrat dalam memenangkan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony pada pilukada tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan. Benarkah Partai Demokrat Way Kanan telah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony sebagai calon bupati yang diusung dalam pilukada tahun 2015? Pertanyaan ini perlu diajukan melihat dari kecenderungan masyarakat yang berorientasi terhadap figur kandidat, bukan melihat partai politik yang mengusungnya. Penelitian ini jenisnya adalah penelitian lapangan atau "*field research*" yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Subyek penelitiannya adalah Partai Demokrat Way Kanan, sedangkan obyek penelitiannya adalah kontribusi dalam bentuk *support*, *branding* dan *marketing* pada kemenangan Bupati Way Kanan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan dan wawancara yaitu suatu percakapan, tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan tehnik wawancara *snowballing* yaitu pewawancara tidak menentukan jumlah informannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kontribusi yang diberikan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan bupati yang diusung pada pilukada tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontribusi yang diberikan oleh Partai Demokrat Way Kanan terhadap kemenangan Bupati Way Kanan. Kontribusi tersebut berbentuk dukungan (*support*) politik dimana Partai Demokrat memiliki 7 kursi DPRD Way Kanan dan memiliki mesin partai yang struktur kepengurusannya hingga tingkat Pimpinan Anak Ranting. Partai Demokrat memberikan *branding* terhadap Bupati Way Kanan sebagai sosok pemimpin yang *melayani dengan jujur* untuk meyakinkan masyarakat Way Kanan. Partai Demokrat memanfaatkan mesin partai untuk melakukan *marketing* politik dengan memasang baner Raden Adipati Surya di 13 rumah pengurus dalam 1 kampung sebelum pelaksanaan pilukada. Setelah itu memanfaatkan media masa seperti koran, televisi, radio, dan baliho ditempat-tempat strategis untuk mengkampanyekan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony. Penulis menemukan kesesuaian antara fungsi partai politik dengan kinerja Partai Demokrat dalam pilukada Way Kanan tahun 2015.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Letnan Kolonel H. Endro Suratmin Telp. (0721) 704030 Sukarame I Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**: KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP
PEMENANGAN BUPATI WAY KANAN PADA
PEMILUKADA TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa

: Tri Sektiono

NPM

: 1431040096

Jurusan

: Pemikiran Politik Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag
NIP: 196505101992031003

Dr. Nadirsah Hawari, M. A
NIP: 197406282008011013

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, M. A
NIP: 197406282008011013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Letnan Kolonel H. Endro Suratmin Telp. (0721) 704030 Sukarame I Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi berjudul KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PEMENANGAN BUPATI WAY KANAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2015 yang disusun oleh Tri Sektiono, NPM: 1431040096, Jurusan : Pemikiran Politik Islam telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018.

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag

(.....)

Sekretaris : Tin Amalia Fitri, S. Sos, M.Si

(.....)

Penguji I : Drs. Effendi, M. Hum

(.....)

Penguji II : Dr M.Sidi Ritaudin, M.Ag

(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag

NPM. 195808231993031001

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: *"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (At-Taubah: 105)

“Seorang muslim tidak akan sempurna Islamnya kecuali jika ia menjadi politisi, berpandangan jauh dalam urusan umatnya, memperhatikan mereka, memiliki rasa cemburu akan umatnya.” **Hasan Al-Banna**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Ayahanda Boyadi dan Ibunda Ismiati tercinta, yang membesarkan dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang, mengasuh, mendidik serta mengarahkan ananda serta selalu mendo'akan agar terwujudnya cita-cita yang suci dan mulia ini.
2. Saudara dan saudariku Mas Arik Eriyantono, S.Pd, Mas Derit Vikiyono, M.Pd Mbak Siti Zaimmatul Masruroh, Mbak Qoni' Nur Hidayah dan seluruh keluarga besar yang telah memotivasi dan selalu mendo'akan keberhasilan penulis.
3. Rekan-rekanku seperjuangan di jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) angkatan 2014, Presidium dan Pengurus UKMF-SALAM 2017/2018, Pengurus dan Presidium UKM BAPINDA 2018/2019, Keluarga K3PU UKM BAPINDA 2018, Keluarga HMJ PPI, Keluarga ADK 14, Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Raden Intan dan teman-teman semua terutama Agus Dwi Prasajo (PGMI/2014), Muhammad Yasin (PGMI/2014), Deden Gusti Laksana (PsA/2015) yang senantiasa mendampingi dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengarahkan dan membimbingku serta memacuku untuk merubah paradigma berfikir lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

TRI SEKTIONO Lahir di Gunung Sari pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 1996, dari pasangan Ayahanda Boyadi dan Ibunda Ismiati Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI Nurul Huda Air Melintang pada Tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Hidayah Lebak Peniangan dan selesai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam, di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, Sebagai Kepala Departemen Media Informasi HMJ PPI (2016) Sebagai Ketua Umum UKMF-SALAM (2017), Sebagai Kepala Divisi K3PU UKM BAPINDA (2018) dan Sebagai Anggota Biasa (AB 1) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sejak 2014.

Bandar Lampung, September 2018
Penulis,

TRI SEKTIONO
NPM. 1431040096

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tiada kata lain yang pantas diucapkan seorang hamba kecuali kalimat puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah begitu besar kepada kita semua. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok pembawa perubahan bagi umat ini. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari ahir kelak. Aamiin

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag**, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta UIN Raden Intan Lampung ini.
2. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**, dan Bapak **Dr. Nadirsah Hawari, M.A**, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Nadirsah Hawari, M.A** selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu **Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf yang ada dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. UPT Perpustakaan baik pusat maupun di fakultas yang telah mendukung penulis dalam hal literature atau buku-buku pendukung.
7. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada penulis semoga semua bantuan itu dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, September 2018
Penulis,

TRI SEKTIONO
NPM. 1431040096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Tinjauan Pustaka.	17
BAB II KONTRIBUSI PARTAI POLITIK DAN PEMILUKADA	
A. Partai Politik	
1. Pengertian Partai Politik	20
2. Sejarah Lahirnya Partai Politik dan Perkembanganya di Indonesia	23
3. Kedudukan Partai Politik.....	27
4. Fungsi Partai Politik	29
B. Pemilihan Kepala Daerah	
1. Pengertian Pemilukada	35
2. Landasan Yuridis	37
3. Sejarah Pemilukada	39

BAB III PARTAI DEMOKRAT DAN PEMILUKADA WAY KANAN

A. Partai Demokrat Way Kanan

1. Sejarah Kabupaten Way Kanan 43
2. Lahirnya Partai Demokrat 43
3. Visi dan Misi Partai Demokrat 45
4. Kiprah Partai Demokrat Di Indonesia 47
5. Profil Partai Demokrat Way Kanan 48

B. Gambaran Pemilukada Way Kanan

1. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon 52
2. Pengundian Nomor Urut 53
3. Dana Kampanye Kandidat 53
4. Hasil pemilukada Way Kanan 54
5. Profil Kandidat 55

BAB IV BENTUK KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILUKADA WAY KANAN

1. Kontribusi Sebelum Pendaftaran 65
2. Kontribusi Saat Kampanye 71
3. Kontribusi Hari Pemungutan Suara 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah: *Kontribusi Partai Demokrat Terhadap Pemenangan Bupati Way Kanan Pada Pemilu pada Tahun 2015*. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu judul penelitian skripsi ini untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemahaman, juga mengarahkan pada pemahaman yang jelas sesuai dengan yang diinginkan penulis.

1. Kontribusi Partai Demokrat

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau bantuan (dalam bentuk benda, tenaga, atau ide-ide/pemikiran).¹ Partai Demokrat adalah partai politik yang didirikan pada 9 September 2001, atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2004.

Kontribusi Partai Demokrat yang dimaksud adalah keterlibatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Way

¹Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 490.

Kanan dalam bentuk *support*, *branding* dan *marketing* dalam memenangkan dan mensukseskan Raden Adipati Surya dan Edward Antony menjadi Bupati Way Kanan periode 2016-2021.

2. Pemenangan Bupati Way Kanan

Pemenangan yang berasal dari kata menang yang artinya dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan) atau unggul, jadi yang dimaksud kemenangan dalam judul ini adalah cara, usaha, atau proses dan strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan dalam memenangkan Raden Adipati Surya sebagai Bupati Kabupaten Way Kanan yang mengalahkan calon *incumbent* pada pilukada 2015.

3. Pilukada Tahun 2015

Pemilihan umum kepala daerah (Pilukada atau Pilkada) adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.² Pilukada 2015 yang dimaksud adalah pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015 yang salahsatunya adalah pemilihan umum kepala daerah dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan yang kemudian

²Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1

dimenangkan oleh Raden Adipati Surya dan Edward Antony mengalahkan Bustami Zainudin dan Adinata.

Jadi *Kontribusi Partai Demokrat Terhadap Pemenaangan Bupati Way Kanan Pada Pemilukada Tahun 2015* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan Partai Demokrat Way Kanan dalam bentuk *support*, *branding* dan *marketing* dalam usahanya untuk memenangkan Raden Adipati Surya dan Edward Antony menjadi Bupati Way Kanan pada pemilukada tahun 2015.

B. Alasan Memilih Judul

Judul ini bagi penulis menarik untuk dibahas dan diteliti dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemilukada adala pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menurut *Clinton Rossiter* “Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai”. Artinya partai politik memiliki peran yang sangat penting didalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan pemilukada. Karena peserta pemilukada diusung oleh partai politik.
2. Penulis ingin mengetahui kontribusi Partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan calon Bupati yang mampu mengalahkan *incumbent* pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan. Partai Demokrat dipilih karena bupati pemenang pemilukada berasal

dari Partai Demokrat dan wakilnya seorang birokrat, bukan berasal dari partai koalisi.

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu pemikiran politik islam yang didalamnya juga mempelajari tentang lembaga-lembaga negara dan pergantian pemimpin dalam pemerintahan.
4. Literatur yang cukup tersedia dan mendukung penulis sehingga diperkirakan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

C. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara serentak sesuai dengan ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilukada dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Pemilukada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 09 Desember tahun 2015, diikuti oleh sebanyak 269 daerah di Indonesia untuk milih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Pemilukada serentak tidak terkecuali dilaksanakan di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Way Kanan. Pemilukada di Kabupaten Way Kanan diikuti oleh 2 pasang calon yang bersaing.

1. Bustami Zainudin, Bupati Way Kanan dan Adinata diusung oleh koalisi PDIP, Partai Gerindra, PKB, dan Nasdem.

2. Raden Adipati Surya dan Edward Antony, diusung oleh Partai Demokrat, PKS, Partai Hanura dan PAN.

Berdasarkan rapat pleno yang di selenggarakan oleh KPU Way Kanan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan perolehan suara³:

No	Kecamatan	Nama Calon		Jumlah
		Bustami Zainudin dan Adinata	Raden Adipati Surya dan Edward Antony	
1	Bahuga	3.160	3.014	6.174
2	Banjit	7.816	15.957	23.787
3	Baradatu	8.730	12.331	20.779
4	Blambangan Umpu	11.260	21.096	32.112
5	Buay Bahuga	3.712	7.790	11.502
6	Bumi Agung	4.370	10.030	14.404
7	Gunung Labuhan	5.739	8.662	14.405
8	Kasui	9.893	6.647	16.540
9	Negara Batin	7.709	8.148	15.857
10	Negeri Agung	8.424	10.550	18.974
11	Negeri Besar	3.808	5906	9.714
12	Pakuan Ratu	8.615	12.019	20.574
13	Rebang Tangkas	4.660	6.352	11.012
14	Way Tuba	3.953	7.885	11.616
Jumlah		91.849	136.387	281.236

³ Sumber: Data KPU Way Kanan, 2015

Adipati Surya berhasil memaksimalkan perolehan suaranya dengan menang di 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Kekalahan pasangan Bustami Zainudin dan Adinata pada pemilu pada di Kabupaten Way Kanan tahun 2015 tidak semestinya terjadi, karena mengingat pasangan ini memiliki latar belakang pengalaman dan keunggulan diberbagai bidang. Nyatanya hal itu belum mampu membawa pasangan ini memenangkan pemilu pada Way Kanan tahun 2015 dengan perolehan suara yang hanya sebesar 40,24%. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Bariza Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyebutkan bahwa kekalahan pasangan *incumbent* karena adanya tim pemenangan yang tidak *loyal*/setia yang ada dalam tim kampanye Bustami di Kabupaten Way Kanan.

Sistem demokrasi Indonesia telah menjadikan pemilihan umum sebagai suksesi kepemimpinan. Reformasi 1998 telah mengubah sistem pemilihan kepala daerah kita dari keterwakilan menjadi secara langsung yang dituangkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Perubahan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, meskipun sistem pemilihan di setiap negara demokrasi tidak selalu sama. Hal itu ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan demokrasi yang diterapkannya.⁴ Pemilihan umum dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik ditingkat pusat, daerah, bahkan sampai ke tingkat kepemimpinan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 109

Memilih pemimpin dalam islam merupakan kewajiban yang tidak terikat oleh lama atau tidaknya waktu memimpin. Dalam konteks kenegaraan, kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab pada prinsipnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenang orang-orang yang dipimpinnya.⁵ Pemilihan umum di Indonesia tidak terpelas dari keterlibatan partai politik, baik dalam pemilu legislatif maupun pilukada. Partai politik berperan sebagai jembatan antara negara dan rakyat dalam proses dan mekanisme politik formal seperti pemilihan umum, pembentukan pemerintahan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap DPR sebagai perwakilan rakyat.⁶ Pilukada sering dimaknai sebagai pesta demokrasi ditingkat lokal, selain juga sebagai ajang perebutan kekuasaan memimpin daerah. Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti *influence* (pengaruh), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force*, dan *authority* (kewenangan)⁷

Mengamati proses pemilihan pada pilukada langsung, menurut Kacung Marijan kita dapat menggambarkan bahwa pencalonan itu seperti balapan mobil. Seorang calon kepala daerah itu akan memenangkan pilukada langsung apabila memiliki 3 kombinasi dalam berkendara, yaitu memiliki mobil yang baik, sopir yang piawai dan bahan bakar yang cukup. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social*

⁵ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 50

⁶ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia*, (Jakarta: The Future Institute, 2014), h. 52

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 71

capital), dan modal ekonomi (*economy capital*), ketiga hal ini dapat mempengaruhi kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat.⁸ Semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula dukungan yang diperoleh dan peluang untuk menang semakin besar.

Mencermati hal-hal diatas, yang dimaksud dengan modal ekonomi adalah dana yang kemudian digunakan untuk membiayai kampanye yang dilakukan oleh calon dan tim suksesnya. Modal politik adalah partai politik yang digunakan sebagai pintu masuk bagi kandidat terutama berkaitan dengan dukungan politik sebagai salahsatu syarat mengikuti pemilu. Modal sosial adalah basis suara utama yang mendukung calon tersebut sebagai buah hasil dari aktifitas sosial yang dilakukannya. Menarik untuk membandingkan modal kandidat yang bersaing dalam pilukada Way Kanan.

Pertama membandingkan moda sosial, Bustami Zainudin tentunya memiliki modal sosial yang lebih besar karena sudah menjabat sebagai bupati satu periode sebelumnya dan sebelum itu pernah menjadi wakil bupati sudah tentu sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Way Kanan. Sebagai bupati tentu juga memiliki kekuasaan terhadap aparaturnegara yang pernah menjadi bawahanya yang tentunya ini sangat menguntungkan bagi *incumbent*. Ditambah lagi didampingi oleh sosok Adinata merupakan orang yang sangat berpengaruh dikecamatan Kasui dan namanya pun sudah dikenal masyarakat. Sementara itu modal sosial Adipati Surya adalah anak dari seorang ayah Hi.

⁸ Kacung Marijan, *Demokrasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006) h. 89

Raden Kalbadi yang merupakan tokoh pengusaha pertanian yang sukses dengan kepemilikan lahan dimana-mana dan memiliki sejumlah karyawan yang cukup banyak di Way Kanan. Raden Kalbadi juga salah satu tokoh politik yang pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati Way Kanan pada pemilu pada 2009. Selain modal sosial dari ketokohan ayahnya, Adipati Surya aktif di beberapa organisasi, yakni pernah menjadi ketua BPC Hipmi Way Kanan 2010-2012, ketua DPD KNPI Way Kanan 2012-2014, dan wakil ketua Kadin Lampung, juga pernah menjadi Ketua Pahmi Kabupaten Way Kanan.

Kedua membandingkan modal *financial*, Bustami Zainudin tentu tidak butuh dana yang besar untuk pencalonannya yang kedua ini karena kinerjanya sudah terbukti selama satu periode sebelumnya. Sebagai bupati tentu sudah mempersiapkan dana khusus untuk mensukseskan ambisinya untuk memperpanjang masa jabatannya. Sementara itu modal Adipati Surya, selain sebagai putra pengusaha kaya di Way Kanan, modal finansial Adipati juga berasal dari usahanya sendiri yang selama ini memimpin beberapa perusahaan salah satunya sebagai Komisaris di beberapa perseroan terbatas diantaranya PT Dipati Internusa Palembang, Komisaris PT Dipati Lampung dan Komisaris PT Dipati Ruberrindo Utama.⁹ Selain juga penghasilannya sebagai anggota DPRD dua periode dapat digunakan sebagai modal tambahan untuk berkampanye keliling daerah Way Kanan.

⁹KOMINFO Way Kanan “Profil Bupati” (On-Line) tersedia di: <http://www.waykanan.go.id/> diakses pada 15 Januari 2018

Ketiga membandingkan modal politik, Bustami Zainudin pernah menjadi Angkata Muda Partai Golkar dan pada tahun 2005 menjadi Wakil Bupati Way Kanan meendampingi Tamanuri, M.M. Kemudian Bustami Zainudin terpilih sebagai Bupati Way Kanan pada 2010 dengan didukung oleh PKP, PKS dan PKB. Bustami Zainudin tercatat sebagai kader PDIP dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPD PDIP Lampung periode 2010-2015. Sementara itu modal politik Raden Adipati Surya sudah tercatat sebagai bendahara Partai Golkar Way Kanan 2002-2007, kemudian hijrah ke Partai Demokrat. Raden Adipati Surya menjabat ketua Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Way Kanan menggantikan ayahnya sejak 2011 hingga sekarang. Menjadi anggota DPRD Way Kanan pada periode 2009-2014, dan terpilih kembali untuk periode 2014-2019 dan membawanya berhasil menduduki jabatan bergengsi sebagai ketua DPRD Way Kanan. Dukungan politik dari koalisi dengan PKS, Hanura dan PAN juga memberikan dukungan sebagai modal politik.

Partai Demokrat sebagai modal politik yang utama bagi Adipati Surya karena partai ini berada dibawah kepemimpinannya. Edward Antony sebagai wakilnya bukan berasal dari kader partai, melainkan berasal dari birokrat. Penulis mencermati keberadaan Partai Demokrat sebagai pengusung Adipati Surya adalah partai yang justru dibesarkannya. Terpilih secara aklamasi pada muscab 2011, Raden Adipati berjanji terus meningkatkan kebesaran partai.¹⁰

¹⁰Fajrun Najah Ahmad, "Raden Adipati Surya Pimpin Partai Demokrat Way Kanan" (On-Line) tersedia di: <http://lampung.tribunnews.com/2011/07/13/raden-adipati-surya-pimpin-partai-demokrat-waykanan> (13 Juli 2018)

Parai Demokrat di Way Kanan pada pemilu 2014 meningkat meskipun secara nasional perolehan suaranya menurun pada pemilu lehislatif 2014, namun Adipati sebagai ketua DPC Partai Demokrat Way Kanan dengan modal sosial dan modal finansial yang dimilikinya berhasil membesarkan partai demokrat. Secara total perolehan suara Partai Demokrat 47.158 masih diatas perolehan Partai Gerindra sebanyak 38.370 suara, sementara PDIP hanya memperoleh total 28.136 suara.¹¹

Benarkah Partai Demokrat Way Kanan telah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony sebagai calon bupati yang diusung dalam pemilukada tahun 2015? Pertanyaan ini perlu diajukan melihat dari kecenderungan masyarakat yang berorientasi terhadap figur kandidat, bukan partai politik pengusung. Mengingat popularitas figur dalam pemilukada langsung mengalahkan mesin partai.¹² Keberhasilan Raden Adipati Surya dalam pemenagan pemilukada Way Kanan dengan modal sosial dan finansial yang kuat menarik dielaborasi adalah bagaimana peran dan keterlibatan Partai Demokrat yang mengusungnya dalam hal ini Partai Demokrat sebagai modal politik dalam memenangkan pasangan Adipati Surya dan Edward Antony sebagai Bupati Way Kanan pada pemilukada tahun 2015. Penulis tertarik untuk menelitinya

¹¹ Teras Lampung, "Anggota DPRD Way Kanan Terpilih: Demokrat dan Gerindra Raih Tuju Kursi" (On-line), tersedia di: <https://www.teraslampung.com/anggota-dprd-way-kanan-terpilih/> (14 Mei 2014)

¹² Moh. Ali Andrias dan Tufik Nurohman, *Partai Politik Dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Tasik Malaya*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 1, No 3, Juli 2013), h. 354

lebih dalam dengan judul *Kontribusi Partai Demokrat Terhadap Pemenangan Bupati Way Kanan Pada Pemilu Tahun 2015*”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah: Apasaja bentuk kontribusi yang diberikan Partai Demokrat dalam usaha memenangkan bupati Way Kanan pada pemilu tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kontribusi yang diberikan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan bupati yang diusungnya pada pemilu tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis: yaitu sebagai bahan ilmiah peneliti-peneliti yang mengkaji kontribusi Partai Demokrat pada pilkada tahun 2015 di kabupaten Way Kanan diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran bagi permasalahan partai politik di kabupaten Way Kanan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi partai politik untuk mengoptimalkan fungsi partai dan efektifnya kinerja mesin partai dalam menggali masa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹³ Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu : penelitian ini dilakukan dikaca atau lapangan objek penelitain atau responden.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang bisa disebut juga penelitian taksonomik yaitu untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁵ Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian pada saat

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

¹⁴ Masari Singaruban dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), h. 89

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Premier

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.¹⁷ Penulis menjadikan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan sebagai responden dalam mencari data-data yang diperlukan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau yang sudah dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder adalah disebut juga dengan data tersedia.¹⁸ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literatur, karya-karya dokumentasi terkait objek penelitian. Data yang dimaksud berkenaan dengan dokumen-dokumen terkait pemilu di Way Kanan dan juga Partai Demokrat.

¹⁶ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.21

¹⁸ Hadi sutrisno *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yp Fak.Psikologi UGM, 1985), h.89

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah acara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan¹⁹. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁰ Jenis dokumen yang peneliti dapatkan seperti buku-buku, majalah, koran atau surat kabar harian, dan dokumen yang berkaitan dengan Partai Demokrat dan pemilu pada Way Kanan tahun 2015.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

¹⁹Haidar Nawawi, *Op. Cit.*, h. 133

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.²² Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara *snowballing* yaitu pewawancara tidak menentukan jumlah informan. Apabila responden pertama dirasa sudah cukup memberikan semua data yang dibutuhkan, maka wawancara selesai. Namun, jika responden pertama memberikan arahan kepada responden kedua maka pewawancara harus melakukan wawancara kembali kepada responden kedua. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan pengurus DPC Partai Demokrat Way Kanan.

4. Pengolahan Dan Analisa Data

Data yang diperoleh dilapangan untuk dinalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu digabungkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kaategori untuk diambil suatu kesimpulan.²³ Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 137

²² Suharsimi Arikundo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), h. 145-146

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993) h. 132

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan akhir. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.²⁵

H. Tinjauan Pustaka

Menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku- buku, jurnal, makalah tulisan- tulisan bebas, skripsi, tesis, dan disertasi yang penulis lakukan.

- 1) Skripsi berjudul “*Analisis Kekalahan Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015*” Skripsi ini ditulis oleh Intan Bariza, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang analisis kekalahan pasangan *incumbent* pada pemilu pada Way Kanan tahun 2015 yang disebabkan

²⁴ Nana Sujana, *Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Semarang: Sinar Baru, 1987), h. 6

²⁵ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.35

oleh adanya pengkhianatan atau ketidak setiaan dari tim pemenangan pasangan *incumbent*.

- 2) Skripsi yang berjudul “*Propaganda Partai Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Di Media Online (Analisis Isi Propaganda Partai Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Di Kompas. Com)*” ditulis oleh Mika Cristian H Fakultas Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dipenegoro. Skripsi ini membahas tentang propaganda yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan jabatan eksekutif di DKI Jakarta.
- 3) Skripsi yang berjudul “*Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony Dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan*” Skripsi ini ditulis oleh Rasniati Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang strategi pemenangan yang digunakan oleh pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony dalam memenangkan Pemilukada serentak tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan.
- 4) Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah*” Skripsi ini ditulis oleh Jeffry Herdiawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang membahas tentang peran dan fungsi partai politik dalam pemilihan kepala daerah mulai dari tahap

pendaftaran hingga tahap penetapan hasil pilkada dan keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan pilkada.

- 5) Makalah yang berjudul “*Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*” ditulis oleh Angga Natalia, dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diterbitkan melalui Jurnal TAPIs yang membahas tentang fungsi partai politik yang dianggap belum maksimal karena pada proses pilkada serentak tahun 2015 ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan pemilukada, keterlibatan partai politik dalam pemilukada dan juga persamaan tempat penelitian. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang sebelumnya adalah skripsi ini lebih berfokus pada partai politik yang terlibat pada pemilukada terkhusus partai demokrat dalam memberikan kontribusi terhadap kemenangan calon Bupati Way Kanan pada pemilukada serentak Kabupaten Way Kanan tahun 2015.

BAB II

PARTAI POLITIK DAN PEMILUKADA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “partire”, bahasa Latin yang berarti “membagi”²⁵. Dalam buku *Economic Et Societie Marx Weber* memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisasi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.²⁶ Partai politik adalah organisasi politik yang dijelaskan atas ideologi tertentu untuk mendapatkan kekuasaan politik. Partai politik erat hubungannya dengan aktivitas pemerintah di suatu negara.²⁷

Menurut Miriam Budiarjo, secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

²⁵ Giovanni Sartori, *Parties And Party Systems, A Framework For Analysis*, (Colchesster: European Consortium for Political Research Press, 2005), h. 3-4

²⁶ Firmansyah, *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 66

²⁷ Dhimas Yoga Prattama, *Pelembagaan Partai Nasional Demokrat: Studi Penguatan Elektoral Di Kabupaten Nganjuk*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari-Maret 2015), h. 109

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional.²⁸ Menurut M. Jafar Hafsah partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan.²⁹

Menurut Lapalombara dan Weiner partai politik ialah organisasi politik yang memiliki kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tidak tergantung pada jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat lokal. Pemimpin ditingkat pusat dan lokal memiliki kehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik baik secara sendiri maupun berkoalisi dengan partai lain, dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum.³⁰

Undang-Undang menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

²⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 404.

²⁹ Muhammad Jafar Hafsah, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011) h. 25.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo:2010) h. 146

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.³¹

Menurut Carl J. Friedrich mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materil.³²

Arifin Rahman mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya.³³

Partai politik sendiri dalam fiqih siyasah dipadankan dengan istilah *al-hizb*. Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya, Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi yang dikemukakan oleh pemikir Barat seperti Soltau. Hizb adalah pilar Khilafah

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik Pasal 1

³² Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 20012), h. 214

³³ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktur Fungsional*, (Surabaya: SIC, 2002), h. 91

Islamiyah.³⁴ Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.³⁵

2. Sejarah Lahirnya Partai Politik Dan Perkembangannya di Indonesia

Berdasarkan sejarah dan perkembangan partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan menjadi berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu sisi dan pemerintah disisi yang lainnya.³⁶ Partai politik berkembang terus hingga saat ini dengan masing-masing membawa ideologi tertentu, antara lain liberalisme, komunisme, sosialisme, fasisme, kapitalisme, kristen demokrat, islam atau pancasila.³⁷

Menjelang perang dunia I telah timbul polarisasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu partai “Kiri” dan partai “Kanan”. Konsep “Kiri versus Kanan” itu berasal dari revolusi Prancis 1873. Para pendukung raja dan struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung ketua, sedang mereka yang ingin perubahan dan reformasi duduk di sebelah kiri. Kini konsep itu diartikan sebagai ekstrim “Kiri”, yaitu campurtangan negara dalam kehidupan

³⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), h.147

³⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h.13

³⁶ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 398

³⁷ Anwar Arifin, *Op. Cit.*, h. 91

sosial dan ekonomi secara utuh seperti negara sosialis-komunis. Sedangkan ekstrim “Kanan” adalah pasar bebas secara total seperti yang terjadi di negara-negara liberal-kapitalis.³⁸

Parta politik diasumsikan sebagai media perjuangan, seperti halnya Indische Partij yang didirikan pertama kali di negeri ini pada 1911 sebagai alat mencapai kemerdekaan.³⁹ Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pelantikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta oleh PPKI maka selama MPR dan DPR belum terbentuk maka kinerja Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat).⁴⁰ Selanjutnya, munculnya maklumat politik pemerintah No X tertanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Hatta tentang perintah mendirikan partai politik. Jumlah partai politik sesuai ketentuan Pasal 77 UUDS Tahun 1950 terdapat 20 partai politik.⁴¹ Partai yang lahir diawal kemerdekaan Indonesia banyak mewakili ideologi-ideologi yang berkembang saat itu.

Partai politik menjadi tumpuan jalanya pemerintahan dan proses diparlemen telah membuat jatuh bangun kabinet demi kabinet. Negara tidak banyak mengontrol partai politik. Bahkan pada masa Orde Lama, partai politik menjadi organisasi yang lengkap, memiliki media massa, sayap

³⁸ *Ibid*, h. 92

³⁹ Andi Setiadi, *Bung Karno Marah*, (Jogjakarta: Palapa, 2014), h. 81

⁴⁰ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, (Bandar Lampung: PKK-PPU FH UNILA, 2015), h. 66

⁴¹ Fatkhurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), h.89-90

organisasi pada tiap sektor, seperti buruh, tani, dan seniman, bahkan memiliki organ paramiliter.⁴² Namun dipenghujung kekuasaan orde lama, terdapat tiga kekuasaan politik utama, yaitu PKI, TNI AD dan presiden Soekarno sendiri. Kekuatan politik yang dominan sebelumnya, yaitu Masjumi dan PSI telah dibubarkan dengan alasan terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta.⁴³

Sistem politik Orde Lama, menurut keyakinan pemerintah orde baru adalah terlalu berperannya partai-partai politik yang terpolarisasi secara ideologi dan dipusatkannya perhatian pada pembangunan politik. Karena itu, pemerintah memandang perlu menekankan pembangunan ekonomi pada masa orde baru. Berhubung pembangunan ekonomi hanya bisa berlangsung dalam keadaan politik yang stabil, maka pembangunan sistem politik yang dapat menjaga kelancaran pembangunan ekonomi yang tentu saja berbeda dari sistem politik versi orde lama menjadi kebutuhan mutlak.⁴⁴

Permendagri No 12 Tahun 1969 yang berisi larangan terhadap semua anggota Golkar yang duduk di DPRD untuk masuk ke partai politik, dan dengan sendirinya pengaruh partai-partai semakin kecil. Kebijakan ini diperkuat dengan PP No 6 Tahun 1970 yang melarang semua PNS termasuk

⁴² Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia*, (Jakarta: The Future Institut, 2014), h. 53

⁴³ M.Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 177

⁴⁴ Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam GOLKAR di era orde baru*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), h. 3-4

ABRI masuk kegiatan politik, dan lagi-lagi menguntungkan Golkar.⁴⁵ Selanjutnya, untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, menciptakan suatu tertib politik yang bebas dari konflik ideologis-politis. Yakni, dengan menolak parpol-parpol yang berbau ideologis-politis dan menyederhanakannya melalui fusi partai menjadi dua PPP dan PDI, ditambah Golkar.⁴⁶

Seiring dengan bergulirnya reformasi 1998 dengan ditandai jatuhnya pemerintahan orde baru tepat pada tanggal 21 Mei 1998, maka babak baru dalam iklim demokrasi di Indonesia telah dimulai.⁴⁷ Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk pendirian partai politik dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Partai politik yang telah didaftarkan, disahkan pendiriannya menjadi badan hukum yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM.⁴⁸ Secara teori, sistem banyak partai terjadi karena dilaksanakannya sistem pemilihan umum proporsional dan adanya kebebasan mendirikan partai politik.⁴⁹

⁴⁵ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 114

⁴⁶ Makrum Kholil, *Op. Cit.*, h. 5-6

⁴⁷ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 77

⁴⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Pasal 4

⁴⁹ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Persada, 2014), h. 143

3. Kududukan Partai Politik

Sebagai negara hukum (*rechstate*) bukan negara kekuasaan (*machstate*) maka hanya hukum yang menjadi satu-satunya kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Konsep negara hukum sendiri selalu berkembang menurut perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.⁵⁰ Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikatnya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakilnya. Para wakil rakyat inilah yang kemudian mewakili mayoritas rakyat melalui partai politik. Oleh karenanya masyarakat memberikan mandat kepada para wakilnya untuk mewakili kepentingannya dalam proses politik dan pemerintahan.⁵¹ Dalam pelaksanaanya peran partai politik sangat diperlukan untuk menyukseskan pemilihan umum. Karena partai politik merupakan komponen terpenting dari negara demokrasi.⁵²

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara

⁵⁰ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 25

⁵¹ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandarlampung, PKK-PUU FH UNILA, 2013), h. 7

⁵² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), h. 61

pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negara -nya (*the citizen*).⁵³

UUD 1945 telah menyebutkan khususnya pada Pasal 6 A ayat (2) dan 22 E yaitu:

Pasal 6 A

*(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*⁵⁴

Pasal 22 E

*(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*⁵⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas telah menunjukkan betapa peran sentral partai politik di Indonesia tidak dapat diabaikan karena partai politik adalah sebagai tempat suksesi kepemimpinan dan alat kontrol dari rakyat atas segala kebijakan pemerintah lewat badan legialatif yang diisi oleh kader-kader partai politik

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), h.710

⁵⁴ Redaksi Puspa Swara, *UUD 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Puspa Swara, 2007), h. 5

⁵⁵ *Ibid*, h.

lewat pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan damai.⁵⁶ Oleh karena itu dapat dipahami mengapa pemikir seperti Antonio Gramsci sampai berani “memuji” partai politik sebagai bagian dari sejarah suatu negara. Mengenai hal itu Gramsci mengatakan bahwa, “.....*Jadi menulis sejarah partai berarti menulis sejarah umum negara tersebut..*”.⁵⁷

4. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.⁵⁸ Dalam perspektif politik keterwakilan di lembaga formal negara, partai politik memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor politik utama yakni partai politik sebagai instrument yang menentukan jalannya pemilu.⁵⁹ Dalam sistem politik demokrasi partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi.

⁵⁶ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 26-27

⁵⁷ Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah, *Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11.No.3.September 2014)

⁵⁸ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, h. 149

⁵⁹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Fajar Media Press: Yogyakarta, 2011), h. 22

a. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Sejumlah pakar komunikasi menulis bahwa “komunikasi adalah politik” atau politik dapat disebut sebagai komunikasi dalam arti komunikasi mencakup politik, karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan melalui *pembicaraan* sebagai salahsatu bentuk komunikasi.⁶⁰ Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai, melalui desas-desus, surat kabar, radio, televisi dan film.⁶¹ Sedangkan komunikasi politik secara bahasa dinamakan pesan (*message*) politik, orang yang menyampaikan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pernyataan dinamakan komunikan.⁶²

Keberadaan partai politik berfungsi menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah dan yang diperintah yaitu masyarakat.⁶³ Komunikasi politik yang harus dijalankan oleh partai politik dalam upaya mencapai tujuan politiknya, maka partai politik itu harus merebut pengaruh dari masyarakat melalui pencitraan dan pembentukan opini publik serta memenangi pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik melakukan

⁶⁰ Anwar Arifin, *Esensi Politik Pencitraan dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 12

⁶¹ Edo Segara, *Humas Gerakan Membangun Citra Gerakan*, (Jakarta: Muda Cendikia Publisir, 2010), 50

⁶² Onong Uchyana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h. 27

⁶³ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 35

sosialisasi dan komunikasi politik dalam bentuk lobi, retorika, kampanye dan kegiatan lainya.⁶⁴

Lebih sederhananya, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap/perilaku, pendapat, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media dengan tujuan politik.⁶⁵ Secara singkat menurut Anwar Arifin komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan membangun bangsa.⁶⁶

b. Partai Politik Sebagai Sasaran Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.⁶⁷ Istilah sosialisasi politik merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik (*political education*), sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik (*political indoctrination*).⁶⁸ Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Salahsatu esensi sosialisasi politik yang harus dijalankan oleh partai politik untuk memperoleh citra yang bagus dari publik, ialah mewariskan

⁶⁴ Anwar Arifin, *Op. Cit*, h. 94

⁶⁵ Onong Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 1986),h. 5

⁶⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik-Filsafat, Paradigma,Teori, Tujuan, dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 8

⁶⁷ Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, h. 407

⁶⁸ Abdul Mukthi Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 19

ideologi, nilai-nilai, dan gagasan-gagasan vital, serta memupuk *identitas nasional* dan memperkuat *integrasi nasional* terutama dinegara yang baru merdeka atau negara yang sedang membangun.⁶⁹ Citra organisasi tidak dapat direkayasa. Citra positif akan terbentuk jika performa organisasi benar-benar seperti apa yang diberitakan oleh lembaga tersebut.⁷⁰

Alfin menekankan dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses sosialisasi politik, pertama, sosialisasi hendaknya dilihat sebagai proses yang berjalan terus menerus selama warga negara hidup. Kedua, sosialisasi dapat terwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi nilai-nilai atau pesan politik secara tegas.⁷¹ Esensi sosialisasi politik yang harus dijalankan partai politik ialah mewariskan ideologi, nilai-nilai dan gagsan-gagasan vital, serta memupuk identitas nasional dan memperkuat integrasi nasional teritma di negara yang baru merdeka.⁷²

c. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattscheider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik⁷³ Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau

⁶⁹ Anwar Arifin, *Esensi Pencitraan dan Komunikasi... Op. Cit*, h. 195

⁷⁰ Edo Segara, *Op. Cit.*, h. 72

⁷¹ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1978) h. 235

⁷² Anwar Arifin, *Op. Cit*, h. 90

⁷³ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute democracy and Welfarism, 2011), h. 90

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁷⁴ Rekrutmen politik menurut Czudnoeski adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok yang dilantik dalam peran-peran politik aktif.⁷⁵

Esensi rekrutmen politik yang harus dilakukan partai politik agar mendapat citra yang baik dari masyarakat adalah mengajak orang-orang muda yang berbakat dan berpotensi untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁷⁶ Fungsi rekrutmen politik juga berkepentingan atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Maka didirikannya organisasi-organisasi massa (*underbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berppartisipasi diperluas.⁷⁷ Rekrutmen politik menjamin kelanjutan dan keberlangsungan partai, sekaligus merupakan salahsatu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada, terutama dalam sebuah negara yang berdsifat heterogen, baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi

⁷⁴ Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, h. 150-151.

⁷⁵ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, "Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 101

⁷⁶ Anwar Arifin, *Esensi Pencitraan dan Komunikasi... Op. Cit*, h. 195-196

⁷⁷ Miriam Budiarmo, *Op. Cit*, h. 408

ataupun agama. Partai politik diperlukan untuk mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.⁷⁸ Dalam artian partai sebagai pengatur konflik (*conflict management*) maka partai politik harus melakukan suatu proses agregasi kepentingan (*aggregation of interest*) yang dapat mengkristalisasi beragam kepentingan masyarakat dan menyalurkannya melalui saluran-saluran yang tersedia.⁷⁹

Partai politik mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan pelbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.⁸⁰ Sebagai pengatur konflik, partai politik harus berusaha mengatasi jika terjadi konflik didalam masyarakat, minimal mengurangi dampak negatifnya.⁸¹ Lagi-lagi demi tegaknya kesejahteraan, maka partai politik harus melirik agama yang dalam pandangan Ibnu Khaldun, agama merupakan kekuatan integrasi, perukun dan penyatu karena agama mempunyai semangat untuk meredakan berbagai konflik.⁸²

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Op. Cit.*, h. 38

⁸⁰ Ramlan Surbakti. *Op. Cit.* h. 153-154

⁸¹ Anwar Arifin, *Esensi Pencitraan dan Komunikasi...* *Op. Cit.* h. 196

⁸² Mohammad Jafar Hafsa, *Op. Cit.*, h. 155

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilukada

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim pemilu di Indonesia. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa setak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lain seperti spanduk, pamflet, sebaran, bahkan, komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau loby yang bersifat penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihanya terhadap salahsatu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁸³ Pemilihan ummum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.⁸⁴

⁸³ A. Rahman H I, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 147

⁸⁴ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9

Pemilukada awalnya disebut sebagai pilkada yang merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang terdapat pada Bagian Kedelapan UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya disebut pemilukada pada UU No. 22 Tahun 2007 “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸⁵ Penamaan pemilukada kemudian berganti kembali dengan “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸⁶

Pelaksanaan pemilukada langsung yang kemudian dilaksanakan secara serentak sejak 2015 merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal sebagai bentuk efisiensi anggaran. Pemilukada merupakan bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengtheing democracy*) serta mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.⁸⁷

⁸⁵ UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (4)

⁸⁶ UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (4)

⁸⁷ Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok: Pustaka Kemang, 2016), h. 41

Pelaksanaan pilukada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hal politik⁸⁸ Kini, pilkada tidak hanya dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga serentak sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.⁸⁹

2. Landasan Yuridis

Amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembentukan pemerintah daerah, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁹⁰ Yang menjadi dasar hukum selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.

⁸⁸ *Ibid*, h. 42

⁸⁹ Rambe Kamaru Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 25

⁹⁰ *Ibid*.

Melihat dan memperhatikan praktik pelaksanaan Undang-Undang pemerintah daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah, baik yang berkenaan dengan bidang tugas maupun yang berkenaan dengan pembangunan bangsa (*nation building*).⁹¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.⁹² Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2010.

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pemilukada yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015 adalah UU No. 22/2014, Perpu No. 1/2014, UU No. 1/2015, dan UU No. 8/2015. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah perlu juga karena pelaksanaan pemilukada terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemerintahan ditingkat lokal. Adapun peraturan perundangan tentang pemerintah daerah yang paling relevan saat ini adalah UU No. 23/2014

⁹¹ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 7

⁹² Rambe Kamaru Zaman, *Op. Ci.*, h. 25

tentang Pemerintah Daerah, Perpu No. 2/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah⁹³

3. Sejarah Pelaksanaan Pemilukada

Pemilukada merupakan upaya demokrasi dan demokratisasi pemerintahan daerah. Demokratisasi ini diwujudkan melalui rekrutmen politik tingkat lokal yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, seperti pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.⁹⁴ Demokrasi langsung merupakan konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan pemimpin daerah dengan masyarakatnya. Asumsinya, pemimpin yang berasal dari daerah bersangkutan akan lebih dekat dengan masyarakat setempat, serta mengetahui seluk-beluk, kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini berbeda dari masa Orde Baru, dimana kepala daerah hampir selalu orang kiriman dari pusat.⁹⁵ Selama Orde Reformasi, sudah tak terhitung berapakah rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri secara langsung kepala pemerintahan diseluruh wilayah NKRI ini.⁹⁶

Pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) di Indonesia sudah berulang kali dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang kemudian sering di sebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Karena demokrasi didefinisikan suatu

⁹³ Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguat Demokrasi di Indonesia*, (Depok: Pustaka Kemang, 2016), h. 15.

⁹⁴ Indra J. Piliang, dkk, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Trio Rimba Persada, 2003), h. 296

⁹⁵ Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016), h. 40

⁹⁶ Das'ad Latif, *Pilkada Nikmat Atau Bencana*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h.

sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat. Pada waktu pemerintahan orde lama pemilu dilaksanakan satu kali, enam kali pada masa orde baru dan 4 kali pada masa reformasi. Pelaksanaan pemilu disetiap negara berbeda-beda, namun pada garis besarnya sistem pemilu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional yang juga dikenal sebagai sistem distrik.⁹⁷

Orde Baru hadir sebagai antitesis dari Orde Lama setelah melewati masa transisi yang berdarah. Dengan mengedepankan “ekonomi sebagai panglima” Orde Baru memberangus kebebasan politik atas nama stabilitas.⁹⁸ Orde baru berakhir setelah Presiden Soeharto dijatuhkan kemudian hal ini berpengaruh terhadap mekanisme pelaksanaan pemilu. Setidaknya ada 3 perubahan mendasar dalam mekanisme pemilu. Pertama, kembali menggunakan sistem multi partai dari sebelumnya dwi partai dan satu golongan karya dalam pemilu yang direalisasikan pada 7 Juli 1999 dengan diikuti oleh 48 partai politik. Kedua, pada pemilu 2004 pemilu dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan yang kedua untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Ketiga, dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum Kepala

⁹⁷ Anwar Arifin, *Op. Cit*, h. 104

⁹⁸ Anis Matta, *Op. Cit.*, 48

Daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.⁹⁹

Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar yang cukup kuat bahwa kedaulatan rakyat adalah dasar bagi pembentukan negara Indonesia.¹⁰⁰ Pemilu tahun 2004 menjadi babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia karena berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihanpresiden melalui mekanisme yang ada di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Perubahan politik yang radikal terjadi di Indonesia antara lain ditandai dengan runtuhnya era orde baru dari sistem politik otoritarian, yang berubah menjadi sistem politik demokratis. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilukada langsung merupakan proses politik untuk memilih para kepala daerah secara langsung yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ketentuan tentang pemilukada langsung merupakan kemajuan demokrasi di Indonesia yang menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut.¹⁰¹

⁹⁹ Rambe Kamaru Zaman, *Op. Ci.*, h. 25

¹⁰⁰ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 71

¹⁰¹ Irtanto, *Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159

Pemilukada langsung dianggap lebih demokratis dengan dua pertimbangan. Pertama, pemilukada langsung memberikan kesempatan yang lebih luas untuk tampilnya/terpilihnya kepala daerah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, dengan pemilukada langsung maka stabilitas pemerintah lebih terjaga karena kepala daerah tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD.¹⁰² Sejak ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, mulai terjadi harmonisasi hubungan antara kewenangan rakyat dan pemerintah. Pasal 1 dan 3 UU No. 8 tahun 2015 menetapkan bahwa rakyat diberikan amanah penuh menentukan pemimpin daerahnya, meskipun pelaksanaanya diatur secara serentak oleh pemerintah.¹⁰³

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik melalui DPRD maupun pemilihan langsung oleh masyarakat selalu melibatkan partai politik. Partai politik menjadi sebuah mekanisme untuk penyampaian pilihan suara rakyat. Partai menjadi wadah bagi pilihan suara rakyat dengan begitu, partai-partai haruslah mendemonstrasikan pandangan atau visi dan misinya untuk secara terus menerus memperbarui nasib bangsa dan rakyat.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Rambe Kamarul Zaman, *Op. Cit.*, h. 24

¹⁰⁴ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru Ke Indonesia-Baru Lewat Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 302

BAB III

PARTAI DEMOKRAT DAN PEMILUKADA WAY KANAN

A. Partai Demokrat Way Kanan

1. Sejarah Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah II Metro.¹⁰⁵

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang –Undang tersebut, maka pada tanggal 27 April 1999 Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid menandatangani Prasasti sebagai tanda peresmian Kabupaten Way Kanan dan sekaligus melantik Drs. Tamanuri sebagai Penjabat Bupati Way Kanan. Tanggal 27 April 1999 inilah yang dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Way Kanan.¹⁰⁶

2. Lahirnya Partai Demokrat

Partai Demokrat lahir dari rahim reformasi ini berasal dari renungan panjang Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih dikenal publik dengan inisial SBY, yang kemudian ditindaklanjuti oleh 98 tokoh hingga lahirlah Partai Demokrat. SBY merupakan peletak dasar dan penggagas

¹⁰⁵ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Kabupaten Way Kanan

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 9 Tahun 2009 Pasal 3

filosofi partai yang dimanifestasikan dalam simbol-simbol dan atribut partai seperti lambang dan bendera partai, hymne, mars paartai, dan lain-lain.¹⁰⁷

Nama Partai Demokrat memang tidak bisa dilepaskan dari sosok SBY. SBY dikenal sebagai salah satu jenderal yang moncer. Ia adalah lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1973. Jabatan terakhirnya adalah kepala staf territorial atau Kaster TNI pada 2001. Pembentukan Partai Demokrat tidak terlepas dari peristiwa kekalahan SBY pada pemilihan calon wakil presiden (cawapres) dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001.¹⁰⁸

Salah satu orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah Vance Rumangkang. Vance Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi presiden. Agar cita-cita tersebut dapat tercapai, maka jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan partai politik. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, perumusan konsep dasar dan *platform* partai sebagaimana yang diinginkan oleh SBY maka dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang.¹⁰⁹

Sebagaimana diketahui untuk menjadi sebuah partai politik yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai

¹⁰⁷ Mohammad Javar Hafsah, *Op. Cit.*, h. 199

¹⁰⁸ Tim Divaro, Yugha E, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 208.

¹⁰⁹ Dapat Diakses melalui, <http://www.demokrat.or.id/sejarah/>, (diakses 12 Maret 2018 pukul 21.00).

pendirinya. Namun muncul pemikiran apabila pendiri partai politik dilengkapi menjadi 99 orang agar mempunyai sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas. Sambungan makna tersebut berhubungan dengan tanggal lahir SBY, yaitu tanggal 9 bulan 9.¹¹⁰

Akhirnya, Partai Demokrat telah lengkap dan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Kepartaian. Maka pada tanggal 10 September 2001 Partai Demokrat didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM.¹¹¹ Ideologi partai adalah Nasionalisme-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.¹¹²

3. Visi dan Misi Partai Demokrat

a) Visi Partai

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan

¹¹⁰ Tim Divaro, Yugha E, *Op.cit.*, h. 210

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 3

Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.¹¹³

b) Misi Partai

- a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

¹¹³ AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 7

- c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.¹¹⁴

4. Kiprah Partai Demokrat Di Indonesia

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR.¹¹⁵ Hasil tersebut menjadi modal untuk mendukung SBY menjadi calon presiden dan berhasil memenangkannya. Partai Demokrat yang saat itu masih berumur sekitar 3 tahun sejak didirikan pada tahun 2001 telah banyak menarik simpati rakyat dalam hal elektabilitas sebagai partai baru.

Prestasi yang berkibar pada tahun 2004 tersebut kemudian berlanjut pada pemilu selanjutnya yakni pada tahun 2009. Pada pemilu 2009 Partai Demokrat berhasil mengukuhkan diri sebagai partai pemenang pemilu. Perolehan yang suara Partai Demokrat melonjak drastis dari hasil sebelumnya. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4 %) di DPR RI, setelah mendapat 21.655.295 total suara (20,81%).¹¹⁶ Kemenangan Partai Demokrat pada

¹¹⁴ AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 8

¹¹⁵ Partai Demokrat, Online diakses melalui, www.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat Pada tanggal 17 Juni 2018

¹¹⁶ *Ibid.*

pemilu 2009 semakin sempurna dikarenakan presiden SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden.

Partai Demokrat gagal mempertahankan suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2009, Partai Demokrat meraup 20,81 persen suara, melonjak 13,36 persen dari 7,45 persen suara yang diperolehnya pada pemilu 2004.¹¹⁷ Namun, pada pileg 2014, perolehan suara partai berlambang tiga berlian itu anjlog lebih dari 10 persen menjadi 10,19 persen. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan perolehan suara Partai Demokrasi merosot drastis. Selain kasus rasuah yang menerpa beberapa kader Partai Demokrat, anjlognya perolehan suara juga mengindikasikan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.¹¹⁸

5. Profil Partai Demokrat Way Kanan

a. Struktur Organisasi

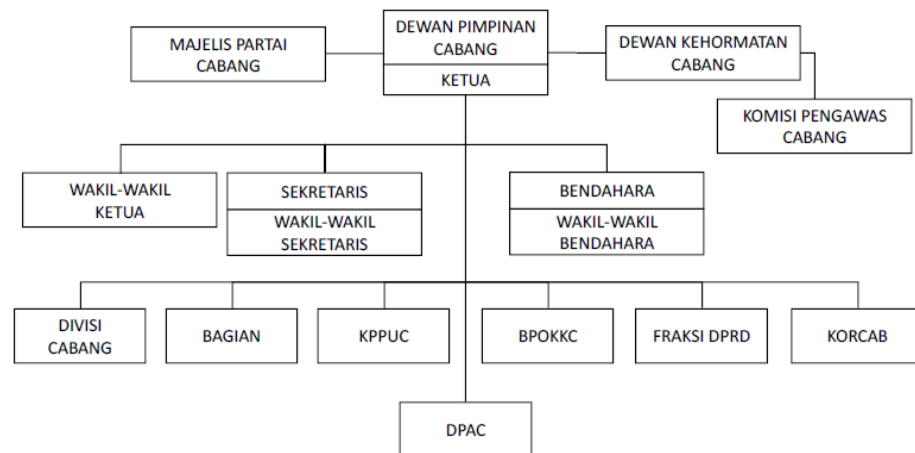
Demokrat adalah salah satu organisasi partai bergerak dalam bidang politik yang terdiri dari jajaran pengurus dan terstruktur dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang berperan penting dalam suksesi pemilihan kepala negara maupun kepala daerah.¹¹⁹ Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat adalah pimpinan partai yang berkedudukan di kabupaten atau kota. DPC Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan berlokasi di

¹¹⁷ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih : Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia*, (Jurnal: Peolitik Vol. 5, No. 10, 2009), h. 575

¹¹⁸ Leo Agustino, *Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014*, (Jurnal: Prisma Vol. 33, No. 1, 2014), h. 116

¹¹⁹ Akbar Faisal, *Partai Demokrat & SBY Mencari Jawaban Sebuah Masa Depan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 71

Kampung Bumi Ratu Kecamatan, Blambangan Umpu, Way Kanan. Ketua DPC Partai Demokrat Way Kanan untuk periode 2011-2016 dipimpin oleh Raden Adipati Surya. Struktur pengurus Partai Demokrat ditingkat cabang adalah:¹²⁰



b. Kiprah Partai Demokrat Way Kanan

Partai Demokrat adalah salah satu organisasi partai bergerak dalam bidang politik yang terdiri dari jajaran pengurus dan terstruktur dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang berperan penting dalam suksesi pemilihan kepala negara maupun kepala daerah.¹²¹

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat adalah pimpinan partai yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Peraturan Organisasi,

¹²⁰ AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 54

¹²¹ Akbar Faisal, *Partai Demokrat & SBY Mencari Jawaban Sebuah Masa Depan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 71

Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta memimpin semua kegiatan di Tingkat Cabang.¹²²

DPC Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan berlokasi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan, Blambangan Umpu, Way Kanan. Raden Adipati Surya menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Way Kanan sejak 2011 hingga sekarang.¹²³ Raden Adipati Surya yang merupakan anak dari Raden Kalbadi yang menjabat Ketua DPC Partai Demokrat pada periode 2006-2011.

Partai Demokrat sudah sejak 2004 terlibat sebagai peserta pemilihan umum di Kabupaten Way Kanan, juga tidak absen dipemilu 2009 dan 2014. Berbicara kemerosotan Partai Demokrat secara nasional pada pemilu 2014, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan. Secara total perolehan suara Partai Demokrat 47.158 masih diatas perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 38.370 suara, sementara PDIP hanya memperoleh total 28.136 suara.¹²⁴

Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh 3 kursi untuk DPRD Kabupaten Way Kanan. Tahun 2010 Partai Demokrat ikut bertarung dalam pemilukada Kabupaten Way Kanan. Partai Demokrat kala itu mengajukan

¹²² AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 57 ayat 1

¹²³ Edward Apriadi, "*Raden Adipari Surya*" Sang Berani Yang Kini Jadi Bupati, www.edwardapriadi.blogspot.com/2016/09/raden-adipati-surya-sang-berani-yang.html?m=1 (diakses pada 4 Agustus 2018, Pukul 07:51)

¹²⁴ Teras Lampung, *Anggota DPRD Way Kanan Terpilih: Demokrat dan Gerindra Raih Tujuh Kursi*, www.teraslampung.com/anggota-dprd-way-kanan-terpilih/ (diakses pada 4 Agustus 2018 Pukul 07:23).

Hi. Raden Kalbadi sebagai calon bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Way Kanan. Hi. Raden Kalbadi dan Yoziriza yang diusung Partai Hanura dan Partai Demokrat meraih 56.251 suara (25,65 persen).¹²⁵

Tahun 2015 Partai Demokrat mencalonkan Raden Adipati Surya sebagai calon bupati di Kabupaten Way Kanan. Raden Adipati Surya berpasangan dengan Edward Antony diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN dan Partai Hanura. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupten Way Kanan, memutuskan nama pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hi. RADEN ADIPATI, S.H., M.M. – DR. Drs. Hi. EDWARD ANTONY, M.M.¹²⁶ Paslon nomor urut 2 unggul di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjit, Baradatu, Blambangan Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Negara Batin, Negri Agung, Negri Besar, Pakuan Ratu, Rebang Tangkas dan Way Tuba. Sedangkann Bustami-Adinata unggul hanya di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bahuga dan Kasui.¹²⁷ Raden Adipati Surya unggul dengan perolehan suara 59,76 persen atau 91.949 suara.

¹²⁵ Berita Lampung, *Hasil Rekapitulasi Pilkada Way Kanan Pasangan Bustami Menang*, www.berita-lampung.blogspot.com/2010/07/hasil-rekapitulasi-pilkada-way-kanan.html?m=1 (diakses pada 4 Agustus 2018 Pukul 08.55)

¹²⁶ Berita Acara Penetapan Paslon Terpilih Pilkada Way Kanan 2015 Nomor: 270/68/BA/KPU-WK/XII/2015

¹²⁷ Minak Luk, *Adipati Unggul di 12 Kecamatan*, www.lampungekspres-plus.com/2015/12/10/pilkada-waykanan-adipati-unggul-di-12-kecamatan/ (diakses pada 4 Agustus 2018, pukul 09:17)

B. Pemilukada Way Kanan

1. Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon

Pemilukada Way Kanan dimulai dengan dibukanya pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 26-28 Juli 2015. Pada hari kedua pembukaan pendaftaran ada 2 pasang calon yang mendaftar tepatnya tanggal 27 Juli 2015, dan sampai penutupan pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 tidak ada lagi pasangan calon yang mendaftar. Pasangan pertama yang mendaftar adalah Bustami Zainudin yang berpasangan dengan Adinata yang kemudian disusul oleh pasangan Adipati Surya dan Edward Antony yang juga mendaftar dihari yang sama. Peserta yang telah terdaftar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pencalon oleh KPU Way Kanan. Penetapan pasangan calon diumumkan 24 Agustus 2015 dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 270/32/BA/KPU-WK/VIII/2015.

No	Pasangan Calon Bupati	Partai Pengusung
1	Hi. Bustami Zainudin, S.Pd, M.H Adinata	PDIP, Partai Gerinda, PKB, dan NasDem
2	Hi. Raden Adipati Surya, S.H, M.M Dr. Drs. Hi. Edward Antony, M.M	Partai Demokrat, PKS, PAN dan Partai Hanura

Sumber: Data diolah Penulis dari KPU Way Kanan

2. Pengundian Nomor Urut

Sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh KPU Way Kanan bahwa setelah dilakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka tahap selanjutnya adalah penetapan nomor urut pasangan calon. Pengundian nomor urut calon berlangsung dalam acara rapat pleno terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Way Kanan Iskardo P Panggar, S.H, M.H bersama komisioner lainnya di halaman sekretariat KPU Way Kanan pada 25 Juni 2015.¹²⁸

Hasil pengundian nomor urut menempatkan Raden Adipati Surya memperoleh nomor urut 2 dan pasangan *incumbent* memperoleh nomor urut 1. Setelah penetapan nomor urut para kandidat diberikan waktu kurang lebih 100 hari untuk melaksanakan kampanye kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dana Kampanye Kandidat

Kampanye kandidat berlangsung selama kurang lebih 100 hari dimulai sejak 27 Agustus 2015. KPU Kabupaten Way Kanan telah menggelar Rapat Koordinasi dengan Liaison Officer (LO) Pasangan Calon, Panwaskab dan Kepala Kantor Kesbangpol di aula KPU Way Kanan membahas mengenai besaran dana kampanye, menetapkan alat peraga dan bahan kampanye dalam pemilukada Kabupaten Way Kanan tahun 2015. Ditetapkan besaran dana

¹²⁸ KPU Kab. Way Kanan, *KPU Way Kanan Tetapkan 2 Pasang Calon Kepala Daerah*, www.kpu-waykanan.go.id/2015/08/24/kpu-way-kanan-tetapkan-2-pasang-calon-kepala-daerah/ (diakses pada 4 Agustus 2018, pukul 09:38)

kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2015 sebesar RP.13.839.900.000. Dana tersebut dipergunakan untuk menyediakan 5 buah Baliho paslon di kabupaten, 20 buah umbul-umbul di kecamatan dan 2 buah spanduk per kampung kemudian untuk bahan kampanye berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster bahan kampanye yang dicetak sejumlah 100.000 buah.¹²⁹ Dana untuk kampanye ini disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada PKPU Nomor 8 Tahun 2015 dan disepakati bersama dengan LO pendukung.

4. Hasil Pemilukada Way Kanan¹³⁰

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Way Kanan pada 22 Desember 2015 terkait hasil pemilukada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pengguna Hak Pilih			Perolehan Suara		
			L	P	L+P	Calon No. 1	Calon No. 2	Total
Bahuga	11	21	3.194	3.042	6.236	3.160	3.014	6.174
Banjit	20	73	12.249	11.816	24.065	7.816	15.957	23.773
Baradatu	22	71	10.950	10.491	21.441	8.730	12.331	21.061
Blambagan Umpu	26	104	16.844	16.034	32.878	11.260	21.096	32.356
Buay Bahuga	9	37	5.850	5.800	11.650	3.712	7.790	11.502
Bumi Agung	10	45	7.350	7.245	14.595	4.370	10.034	14.404
Gunung Labuhan	21	52	7.375	7.253	14.628	5.739	8.662	14.401

¹²⁹Sumber: KPU Way Kanan

¹³⁰ Sumber: KPU Way Kanan

Kasui	19	60	8.597	8.143	16.740	9.893	6.647	16.540
Negara Batin	15	58	8.292	7.759	16.051	7.709	8.148	15.857
Negeri Agung	19	65	9.968	9.211	19.179	8.424	10.550	18.974
Negeri Besar	13	41	5.107	4.781	9.888	3.808	5.906	9.714
Pakuan Ratu	19	76	10.791	10.110	20.901	8.615	12.019	20.634
Rebang Tangkas	10	37	5.825	5.337	11.162	4.660	6.352	11.012
Way Tuba	13	40	6.011	6.016	12.027	3.953	7.885	11.838
Total	227	780	118403	113038	231441	91849	136391	228240

Rapat pleno dihadiri anggota dan Ketua KPU Way Kanan, Panwaslu, Pj Bupati Albar Hasan Tanjung, Kapolres Harseno S.Ik, Dandim 0427 Letkol Edi Prayitno, seluruh Ketua dan Anggota PPK, serta Liaison Officer (LO) Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih, Ali Rahman SH dan Suradal ini menetapkan pasangan nomor 2 memperoleh suara 136.391 atau 59.76 persen, sementara pasangan nomor urut 1 memperoleh 91.949 suara atau 40,24 persen dari jumlah suara sah 228.240 suara dengan tingkat partisipasi 69 persen sesuai data yang dirilis KPU Way Kanan. Jumlah DPT (Daftar pemilih tetap) pada pemilukada 2015 di Kabupaten Way Kanan adalah 337.142 pemilih dengan rincian 172.380 pemilih laki-laki dan 164.762 pemilih perempuan.

5. Profil Kandidat

Kandidat dalam pilkada serentak tahun 2015 di Way Kanan terdiri dari dua pasang kandidat yaitu:

- a. Calon Bupati Nomor Urut 1

1. Data Pribadi

Nama Lengkap	H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., MH
Tempat/Tanggal Lahir	Lampung g, 08 Oktober 1969
NIK	1808010810690003
Usia	46 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	1. Jl. Mayjen Ryacudu KM 5, Blambangan Umpu 2. Komplek Perwira Tinggi Agkatan Darat (KPAD) Blok F No. 45 RT 016/ RW 02 Kel. Joglo Kembang, Jakarta Barat
Email	-
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	09.122.467.5-321.000
Hobi	Musik dan Olah Raga
Moto Hidup	-

2. Pendidikan

Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk-Lulus)
Sekolah Dasar	SD Negeri Gunung Labuhan, Lampung Utara	(1977-1978)
Sekolah Dasar	MIN 1 Tanjung Karang	(1978-1982)
SMP	SMPN Kedaton, Tanjung Karang	(1982-1985)
SMA	SMAN 5 Tanjung Karang	(1985-1988)
Strata Satu (S1)	Universitas Lampung Jurusan MIPA Fisika	(1988-1993)
Strata Dua (S2)	Universitas Bandar Lampung Jurusan Ilmu Hukum	(2011-2013)

b. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1

1. Data Pribdi

Nama Lengkap	ADINATA
Tempat/Tanggal Lahir	Kasui Lama, 6 April 1975
NIK	1808020004750005
Usia	40 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	Kasui Lama RT 001/RW001 Desa Kasui Lama Kec. Kasui
Email	-
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	14.757.916.3-326.000
Hobi	Olahraga dan Musik
Moto Hidup	-

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk-Lulus)
Sekolah Dasar	SD Negeri Kasui Lama	(1982-1988)
SMP	SMP Negeri Kasui	(1988-1991)
SMA	Paket C	(2005)

c. Calon Bupati Nomor Urut 2

1. Data Pribadi

Nama	HI. RADEN ADIPATI SURYA, SH. MM
Tempat/Tanggal Lahir	Bumi Ratu, 15 September 1978
Alamat	RT002/001 Kampung Bumi Ratu Kec. Blambangan Umpu
NIK	1808011509780001
Usia	37 Tahun
Email	aedhi3996@yahoo.com
Jenia Kelamin	Laki-laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam
NPWP	07.333.133.2.326.000
Hobby	Olahraga, Menyanyi, Membaca dan Photograper
Moto Hidup	Sukses di raih karena berani dan

	jujur
--	-------

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Institusi	Tahun (Masuk-Lulus)
Sekolah Dasar	SD Negeri Bumi Ratu	(1985-1991)
SMP	SMP Xaverius Rawa Laut Bandar Lampung	(1991-1994)
SMA	SMU Negeri 3 Bandar Lampung	(1994-1997)
Sarjana S1	Universitas Jakarta	(2009-2011)
Sarjana S2	Universitas Jakarta	(2013-2014)

d. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2

1. Data Diri

Nama	DR. DRS. HI. EDWARD ANTONY, MM
Tempat/Tanggal Lahir	Muara Enim, 8 Oktober 1960
Alamat	RT003/001, Kam. Ramsai, Kec. Way Tuba
Nama Istri	Hj. Thurismawaty
Usia	55 tahun
Jenia Kelamin	Laki-laki
Status Perkawinan	Kawin
Agama	Islam

2. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Institusi
Sekolah Dasar	SD Kristen Bandar Jaya, Lampung Tengah
SMP	SMP Poncowati, Lampung Tengah

SMA	SMEA Muhamadyah Metro
Sarjana S1	PLS STKIP Muhamadyah Kota Bumi
Sarjana S2	STIE IPWI, Jakarta
Sarjana S3	Universitas Padjajaran, Bandung

BAB IV
BENTUK KONTRIBUSI PARTAI DEMOKRAT
PADA PEMILUKADA WAY KANAN

Demokrasi langsung merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan mendekatkan pemimpin daerah dengan masyarakat. Asumsinya, pemimpin yang berasal dari daerah bersangkutan akan lebih dekat dengan masyarakat setempat, serta mengetahui seluk-beluk, kebutuhan dan aspirasi mereka. Perubahan ini sangat berbeda dari masa Orde Baru, dimana kepala daerah hampir selalu orang kiriman dari pusat yang belum tentu memahami permasalahan daerah tersebut. Meskipun selanjutnya calon kepala daerah tidak harus berasal dari daerah tersebut. Melihat dan memperhatikan praktik pelaksanaan Undang-Undang pemerintah daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah, baik yang berkenaan dengan bidang tugas maupun yang berkenaan dengan pembangunan bangsa (*nation building*).¹³¹

Umum diketahui bahwa pada saat pertama kali dicanangkan, pilukada diharapkan akan mampu memperbaiki proses mekanisme politik.. Dengan pilukada langsung masyarakat memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk terlibat secara langsung dalam memilih sendiri siapa-siapa yang pantas menjadi pemimpin daerahnya. Pilukada menjadi fasilitas yang penting untuk penguatan demokrasi dalam upaya melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya.

¹³¹ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 7

Khalifah Umar Bin Khatab pernah mengatakan bahwa tidak ada islam kecuali dengan adanya jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan *imamah*, dan tidak ada *imamah* kecuali adanya kepatuhan dan ketaatan. Tindakan pemberontakan terhadap pemimpin dan pemberi fatwa (untuk memberontak) merupakan sebab kerusakan yang paling besar bagi negara dan rakyat, dan merupakan sebab berpalingnya umat dari petunjuk dan jalan yang benar.¹³² Dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S An Nisa: 59). Seorang muslim memiliki kewajiban untuk taat kepada perintah Allah Swt, Rosulullah Saw dan taat kepada pemimpin (*ulil amri*), ketaatan kepada pemimpin berbeda dengan dua ketaatan sebelumnya yang mutlak. Taat kepada pemimpin hanya berlaku bagi pemimpin yang mengajak kedalam kebaikan dan tidak mengajak untuk bermaiksiat kepada Allah dan Rosul-Nya. Pemimpin yang mengajak kedalam kemaksiatan dan dosa tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang berkedudukan tinggi (kuat secara

¹³² Syeikh Muhammad Bin Umar, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 36

posisi, sehingga diperlukan orang yang memiliki kekuatan untuk mengemban amanah ini. Allah Swt telah mengingatkan tentang memilih pemimpin dalam firmnya:

.....إِنَّ خَيْرَ مَنْ آسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “....*Sesungguhnya orang yang terbaik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (amanah)*”. (Q.S Al-Qashas: 26)

Peserta pemiluakada merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹³³ Ketentuan ini ditambah dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “peserta pemiluakada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Undang-undang ini telah memberikan posisi yang strategis bagi partai politik terutama dalam upaya penguatan fungsi partai politik dan peningkatan kelembagaan partai politik. Ada hal yang harus dilakukan partai politik untuk memenangkan pemiluakada. Partai politik wajib mencetak kader-kader terbaik yang akan menduduki posisi pengambil kebijakan. Partai politik dalam menentukan calon pemimpin yang diusung hendaknya memilih kader yang memiliki kemampuan *leadership* yang mumpuni dan *track record* yang baik. Kader yang dicalonkan hendaknya memberikan dampak positif, misalnya meyakinkan bergabungnya partai politik lain untuk mendukung kemenangan calon yang diusung dan membangun koalisi. Pada dasarnya partai politik sebagai pilar negara demokrasi

¹³³ UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (2)

berkewajiban mencetak kader yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Terkhusus dalam islam dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus mencintai rakyatnya. ‘Auf Ibn Malik mendengar Rasulullah Saw bersabda: *“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan merekapun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan merekapun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.* ‘Auf berkata: *“Ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak kepada mereka?”* Beliau Saw. bersabda: *“Jangan, selama mereka masih mendirikan sholat ditengah kalian”.* (H.R Muslim: 660)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik melalui DPRD maupun pemilihan langsung oleh masyarakat selalu melibatkan partai politik. Partai politik menjadi sebuah mekanisme untuk penyampaian pilihan suara rakyat. Partai politik juga menjadi organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung memberikan kesempatan kepada partai politik untuk terlibat didalam setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah dalam upaya memperoleh kedudukan politik. Tahapan pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang meliputi: (a) pendaftaran daftar pemilih, (b) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala

daerah, (c) kampanye, (d) pemungutan suara, (e) penghitungan suara, dan (f) penetapan pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah.¹³⁴

Partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisasi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai Demokrat di Kabupaten Way Kanan juga melakukan hal yang demikian, sebagai partai politik yang berperan sebagai pilar tegaknya demokrasi turut terlibat dalam pelaksanaan proses pemilukada. Pada pemilukada tahun 2015 Partai Demokrat Way Kanan mengusung Hi. Raden Adipati Surya, S.H., M.H yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Way Kanan untuk memperoleh kedudukan sebagai Bupati Kabupaten Way Kanan. Pencalonan merupakan cara yang dilakukan oleh partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui ikut serta dalam pemilihan umum. Partai Demokrat Way Kanan dalam upayanya untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilukada harus menjalankan fungsinya sebagai partai politik secara maksimal. Menurut Miriam Budiarjo fungsi partai politik, yaitu melakukan komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelola konflik. Undang-Undang pemilukada secara langsung sebagai pembuktian bahwa lahirnya figur atau tokoh yang dipilih oleh masyarakat adalah hal yang sangat penting hari ini. Mengingat orientasi masyarakat dalam memilih pasangan calon dalam

¹³⁴ UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 65 Ayat (3)

pemilukada bukan memilih partai politiknya saja, tetapi figur sang calon sendiri yang menentukan.¹³⁵

Benarkah Partai Demokrat Way Kanan telah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan Raden Adipati Surya sebagai calon bupati yang diusung dalam pemilukada tahun 2015? Pertanyaan ini perlu diajukan melihat dari kecenderungan masyarakat yang berorientasi terhadap figur kandidat, bukan partai politik pengusung. Arif Zaafril Razaqtiar mengatakan popularitas figur dalam pemilukada langsung mengalahkan mesin partai.¹³⁶ Untuk menjawabnya perlu memperhatikan keterlibatan Partai Demokrat Way Kanan dalam setiap tahapan pemilukada mulai dari pra pemilukada, saat kampanye, dan saat hari pemungutan suara.

1. Kontribusi Sebelum Pendaftaran

UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan peserta pemilihan yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai perahu atau kendaraan politik bagi tiap-tiap pasangan calon kepala daerah. Partai politik juga memiliki kewenangan

¹³⁵ Arif Zaafril Razaqtiar, *Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus-Desember 2016), h. 353

¹³⁶ Moh. Ali Andrias dan Tufik Nurohman, *Partai Politik Dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Tasik Malaya*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 1, No 3, Juli 2013), h. 354

untuk mengikutsertkan kader terbaiknya untuk bersaing memperoleh kekuasaan.

Khalifah Ali Bin Abi Thalib r.a mengatakan bahwa “keburukan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”. Kaitanya dalam kemenangan pemilu, partai politik harus menyusun strategi yang terperinci untuk memenangkan pemilu. Partai politik yang gagal merencanakan artinya telah merencanakan kegagalannya sendiri. Untuk menyusun strategi kemenangan pemilu biasanya dibentuklah tim kemenangan pemilu atau tim sukses. Tim ini bekerja menyusun strategi untuk dijalankan oleh mesin partai. Deni Ribowo selaku Ketua Bapil Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Iya, Partai Demokrat si bukan hanya Partai Demokrat semua partai punya bidang kemenangan pemilu di Bapil Partai Demokrat.”¹³⁷

Bapil Partai Demokrat bekerja menyusun strategi untuk memenangkan Raden Adipati Surya, tidak hanya strategi yang disiapkan untuk kandidat yang diusung tetapi juga strategi untuk menyerang strategi lawannya dan tentunya strategi yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi politik yang berkembang pada waktu itu. Perang strategi dengan kandidat lawan tentu tidak dapat dihindarkan, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an:

وَمَكْرُوءٌ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ﴿٥٦﴾

¹³⁷ *Ibid.*

Artinya: "*orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya*". (Q.S Al Imran 54)

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.¹³⁸ Partai Demokrat Way Kanan pada pemilu legislatif tahun 2014 memperoleh 47.158 suara atau 19,25 persen mengungguli partai lainnya dengan merbut 7 kursi atau 17,5 persen kursi DPRD Way Kanan.¹³⁹ Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

"Ee maka pada tahun 2014 kita melakukan kemenangan pemilu kemarin 2014 kita menang pemilu. Demokrat mendapat jatah kursi Ketua DPR di Kabupaten Way Kanan. Nah, itulah modal kita. Dengan modal kita menang pemilu kemarin itu kita melakukan strategi membangun struktur partai hingga ketingkat dusun/anak ranting juga kita bangun. Lalu kemudian itulah modal kita untuk ikut pilkada tahun 2015."¹⁴⁰

Partai Demokrat sebagai organisasi partai yang bergerak dalam bidang politik yang terdiri dari jajaran pengurus dan terstruktur dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang berperan penting dalam suksesi pemilihan kepala negara maupun kepala daerah. Keberadaan mesin Partai Demokrat Way Kanan yang terstruktur hingga tingkatan yang paling

¹³⁸ Perpu No. 1 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1

¹³⁹ Sumber Data KPU Kab. Way Kanan

¹⁴⁰ Deni Ribowo, Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan, Wawancara Pribadi, 19 Juli

bawah/pimpinan anak ranting menjadi modal berharga dalam menghadapi pemilukada ketika dapat bekerja dengan maksimal. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Pada waktu pilkada 2015 itu ee kita memang memberdayakan mesin partai, semua mesin partai ini yang 1 tahun sebelumnya memang sudah panas memenangkan pemilu, lalu kemudian di 2015-nya lagi kita panaskan lagi.”¹⁴¹

Partai Demokrat yang berideologi Nasionalisme-Religius, tentu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.¹⁴² Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan partai tersebut, Partai Demokrat Way Kanan perlu untuk meraih kekuasaan dengan cara mengikuti pemilukada dan memenangkannya. Agar tujuan itu tercapai Partai Demokrat Way Kanan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari partai lain yang ingin bergabung dan membangun koalisi. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Kekuatan dari partai koalisi itu, pada waktu itu koalisi tunggalnya PKS. Lalu bergabung kembali Partai Hanura untuk ikut berkoalisi, kemudian lagi menjadi partai pendukung ee PAN yang ikut bergabung dengan kita dan alhamdulillah beberapa strategi pemenangan memang partai pendukung itu mengikuti arah dari strategi pemenangan dari Partai Demokrat.”¹⁴³

¹⁴¹ Deni Ribowo, *Op. Cit.*,

¹⁴² AD ART Partai Demokrat 2015 Pasal 3

¹⁴³ Deni Ribowo, *Op. Cit.*,

Koalisi yang dibangun Partai Demokrat bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurni Rakyat untuk menghadapi pemilu pada tahun 2015 diberi nama BERANI (Bersama Raden Adipati dan Edward Antony) yang kemudian menjadi *branding* bagi pasangan yang mendapat Nomor Urut 2 ini.

Kesuksesan partai politik dalam mengusung kandidat kepala daerah menurut Czudnowski ditentukan oleh individu sang calon sendiri yang harus memiliki: *sosial background, political socialization, initial political activity, apprenticeship, occupational variables, motivations*.¹⁴⁴ Artinya partai politik dalam menentukan kandidatnya harus melihat individu sang calon apakah memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi atau tidak. Deni Ribowo selaku Ketua Bapil Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Pertama kita eee, kita mengusung Bupati dan Wakil Bupati kita itu melakukan mapping ,eeee survei muncul atau tidak nama kita (Raden Adipati Surya). Nah, kemudian muncul nama kita kalau tidak salah waktu itu sampai hanya 9% pak adipati elektabilitasnya, popularitasnya hanya 54% karena beliau baru dilantik menjadi ketua DPR, nah kemudian setelah hasil dari survei Partai Demokrat itu kita melakukan bagaimana menaikkan popularitas beliau.”¹⁴⁵

Secara teoritis, bagi pejabat yang *incumbent* ia tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan modal yang terlalu besar karena masyarakat sudah mengenal dan memahami kinerjanya. Kandidat lain dari awal harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mensosialisasikan nama, karakter, visi

¹⁴⁴ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, h. 150

¹⁴⁵ Deni Ribowo, *Op. Cit.*,

dan misi kepada masyarakat.¹⁴⁶ Partai Demokrat dalam mencalonkan Raden Adipati Surya berhadapan dengan calon *incumbent*, yang tentunya sudah lebih dikenal oleh masyarakat Way Kanan. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Partai Demokrat harus melakukan sosialisasi dan pengenalan kandidat yang akan dicalonkan dalam pemilu pada Way Kanan tahun 2015. Deni Ribowo selaku Ketua Bapil Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Ee kita lakukan eee menginstruksikan semua jaringan partai untuk memasang baner, poster, spanduk ke semua kader partai. Jadi semua kader partai itu wajib untuk memasang baner-baner di setiap kampung. Nah, kepengurusan kita itu setiap kampung ada 13 orang. 13 orang. Jadi kalau 13 orang 13 rumah berarti pasang baner yang sama. Nah terus next bulan, 2 bulan kemudian kita survei lagi itu naik, mulai merangkak naik hingga sampai 12% dan elektabilitasnya. Terus popularitasnya dia naik naik juga, naik sampai dengan eee hampir 60-65% lah, eee ininya. realistis gitu lho. Hanya Elektabilitasnya dia naik berapa persen, sedangkan popularitasnya naik hampir 10% itu. Jadi jadi tahapan-tahapan itu, nah setelah itu dilakukan ee sebelum penetapan oleh ee setelah kita menemukan partai koalisi ya.”¹⁴⁷

Kinerja mesin Partai Demokrat cukup berhasil dalam upaya peningkatan elektabilitas dan popularitas Raden Adipati, terbukti terjadi peningkatan 3 persen pada elektabilitas dan 9 persen pada popularitasnya. Keberadaan 13 pengurus dalam 1 kampung ini diharapkan bekerja layaknya rumah siput yang akan membentuk pusaran yang semakin besar dalam perjalanan kemenangan Raden Adipati Surya menjadi Bupati. Kinerja Partai Demokrat yang teratur dan terstruktur dalam usahanya

¹⁴⁶ Ruslan Ismail Mage, *Berpolitik Dengan Biaya Murah*, (Bantul: Thafa Media, 2013), h.

¹⁴⁷ Deni Ribowo, *Op. Cit.*

memenangkan Raden Adipati Surya dan Edward Antony tentunya patut untuk diberikan apresiasi, mengingat hal yang demikian juga dianjurkan dalam ajaran agama islam agar dalam melaksanakan pekerjaan dilaksanakan dengan teratur. Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَنٌ مَرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. (Q.S As Saff: 4)

2. Kontribusi Saat Kampanye

Kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang ditawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.¹⁴⁸ *Marketing* politik merupakan cara untuk merebut hati masyarakat dan membuat mereka memilih calon yang diinginkan. Salahsatu strategi *marketing* politik itu dengan melakukan kampanye.

Pelaksanaan kampanye harus menggunakan strategi berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi daerah kampanye. Partai Demokrat dalam mengoptimalkan kampanye yang dilakukan memanfaatkan mesin partai yang sudah dibentuk sebelumnya untuk memenangkan pemilu

¹⁴⁸ Bowo Sugiarto, dkk, *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 27, No. 3, 2014), h. 145

legislatif tahun 2014. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat

Way Kanan mengatakan:

“Kita lakukan eee strategi bagaimana sosialisasi yang secara masif. Secara masif itu adalah semua kader partai kita, kita minta untuk merekrut relawan. Masing-masing di desa. lalu kemudian kita menggandakan lagi. Kalau dia 13 orang tadi setiap desa dia mencari lagi, menggandakan lagi menjadi 13 lagi, jadi 26 orang 1 desa. Kita kampanyekan lebih besar lagi. Terus naik-naik naik itunya. apa namanya eee elektabilitas dari ee apa, ee Pak Adipati.¹⁴⁹

Penulis menilai yang dilakukan oleh Partai Demokrat Way Kanan dalam melakukan kampanye menggunakan sistem *multi level marketing*, dimana 1 orang yang direkrut bertugas untuk merekrut orang lagi sehingga terbentuk jaringan yang semakin berkembang besar. Sistem *multi level marketing* menurut Sipil Institut merupakan saluran investasi politik yang efektif dalam menciptakan jaringan-jaringan sosial yang tidak terbatas ke beberapa komunitas produktif ditengah masyarakat. Berawal dari istri yang merupakan orang terdekat, turun kedua anak dan satu keponakanya. Kemudian bergeser kesamping bisa memasuki wilayah berfikir ibu dan bapak mertuanya, dan terus menjalar kebeberapa tetangga dekat. Dari hubungan kekeluargaan, jaringan-jaringan sosial bisa menyebar ke relasi lain, seperti teman seprofesi, atau teman senasib.¹⁵⁰

Perencanaan merupakan bagian yang menentukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila memiliki modal *financial*, kemampuan menguasai informasi/media masa dan

¹⁴⁹ Deni Ribowo, *Op. Cit.*

¹⁵⁰ Russlan Ismail Mage, *Op. Cit.* h.37

kemampuan membangun jaringan sosial. Selain itu konsolidasi dan tim kampanye merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Nah ada teritorial untuk kampanye itu, yang pertama itu serangan udara itu kita melalui iklan-iklan, radio, televisi, koran gitu kan. Ada serangan darat, pertemuan-pertemuan, beberapa pertemuan-pertemuan kita lakukan disetiap kecamatan, kampung-kampung, melalui konsolidasi kader tadi. Kader-kader itu kita konsolidasikan lalu kemudian kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kita lakukan sosialisasi ee perkenalan kandidat itu tadi. Itu lebih dari 2 bulan lebih 3 bulan lebih yang terus setiap hari, kadang sehari 2 tempat 3 tempat kita lakukan itu. Nah yang kedua, itu tadi yang pertama melalui media kampanye.”¹⁵¹

Upaya kemenangan Raden Adipati Surya oleh Partai Demokrat Way Kanan dilakukan dengan melakukan konsolidasi internal melalui pertemuan-pertemuan dan membangun jaringan-jaringan sosial terhadap tokoh-tokoh masyarakat untuk sosialisasi dan memperkenalkan kandidat yang diusung. Partai Demokrat juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kampanye kandidat guna menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi melalui iklan di media elektronik dan cetak.

Partai Demokrat Way Kanan membuat *branding* terhadap Raden Adipati Surya dalam upayanya menggalang dukungan dari masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan:

¹⁵¹ Deni Ribowo, *Op. Cit.*

“Yang kedua ini itu isu dimasyarakat. Isu terhadap infrastruktur, isu terhadap eee apa namanya isu. Isu terhadap isu-isu ya ehh. Lalu kita menemukan jargon melayani dengan jujur, bahwa pemimpin itu harus melayani dengan jujur. Itu berdasarkan isu dari isu isu tadi iya kan. Saya tidak mau mendeskreditkan itu, tapi itu dari isu-isu tadi. Lalu, muncul lah ee jargon yang melayani dengan jujur.”¹⁵²

Penulis mencermati dari hasil wawancara diatas adanya patologi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan mengintimidasi melalui memanfaatkan kelemahan lawan (*incumbent*) yang dianggap gagal memperbaiki infrastruktur di Way Kanan serta gagal mewujudkan visi misi yang dijanjikan sebelumnya dan ini dianggap tindakan membohongi masyarakat. Sosok Raden Adipati Surya dianggap sebagai solusi dari kekecewaan masyarakat yang digambarkan sebagai pemimpin yang melayani dengan jujur untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Way Kanan. Apa yang dilakukan Partai Demokrat ini jelas bertentangan dengan firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ

عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ

الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٠﴾

¹⁵² Deni Ribowo, *Op. Cit.*

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”*. (Q.S Al-Hujarat:11)

Sejatinya *marketing* politik yang dilakukan kandidat berorientasi sebagai penjual dengan menawarkan gagasan, ide-ide kreatif, pemikiran solusif, integritas, loyalitas, kebenaran, kejujuran, keadilan, moralitas dan konsistensinya berpihak kepada rakyat. Kemudian rakyat yang bertindak sebagai pembeli dengan menggunakan alat bayar suaranya.¹⁵³ Berbeda dengan yang dilakukan Partai Demokrat dalam kemenangan Raden Adipati Surya. Raden Adipati dicitrakan tidak sebagai penjual, tapi sebagai pelayan yang siap mewujudkan keinginan masyarakat Way Kanan sebagaimana yang dikatakan oleh Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan:

Nah kemudian ee ada program, janji politik. Janji politik ini program, visi misi. Nah program visi misi yang yang kita buat itu nggak muluk-muluk. Itupun kita sebetulnya hanya membaca dari visi misinya lawan. Ketika lawan itu bilang nanti kalau saya jadi, ini jalan akan

¹⁵³ Ruslan Ismail Mage, *Op. Cit.*, h. 65

saya perbaiki begini-begini-begini harga akan begini-begini begini pupuk akan begini, mudah. Sekolah akan gratis begini begini begini. Nah, kita tidak melakukan hal yang sama. Tapi kita katakan bahwa, program kerja Adipati Edward Antony ini adalah bagaimana Adipati ingin mendengarkan dan melaksanakan keinginan rakyat. Lha elo pengen apa? Elo pengen jalan bagus, ya itulah program gua, pupuk mudah? Ya itu program gua. Jadi kita tidak pernah. Pertama yang harus kita lakukan kita tidak mau berjanji. Kita tidak mau berjanji dengan masyarakat. tapi, kalau masyarakat pengen itu ya itulah. Apa namanya tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin untuk melaksanakan keinginan masyarakat itu. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah respon masyarakat baik terhadap pak pak Adipati karena kita tidak keluar dari jalur itu. On the track terhadap ee isu-isu politik yang janji-janji politik yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa adipati ingin mendengarkan dan melaksanakan keinginan rakyat itu. Itu aja, itu yang bikin menang sebenarnya. Nggak muluk-muluk. Kita gggak nggak pernah berjanji jalan ini akan bagus, ngak.¹⁵⁴

Berbagai bentuk komunikasi politik seperti agitasi, propaganda, *publik relations* dan retorika dapat digunakan untuk kampanye politik. Meskipun di Indonesia penggunaan agitasi dan propaganda yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, etika dan moral tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Tapi, kita nggak pernah menjelek-jelekkan. Yang ketiga itu nggak pernah lawan lain itu. Tapi kita ngebagus-bagusin calon kita. Itulah 3 isu, faktor isu yang bisa bikin partai demokrat menang pada pilkada kemarin waktu itu. Ditambah lagi situasi politik, kejenuhan politik, kejenuhan masyarakat, kejenuhan pemilih, inilah yang membuat ee menjadi mahnet untuk pengen ganti dan alhamdulillah kita menang 63% kalau tidak salah. 63% kita menang pada pilkada itu.”¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibid*,

¹⁵⁵ *Ibid*,

Demokrasi modern membutuhkan dana yang cukup besar, setidaknya ada dua alasan menurut Ruslan Ismail Mage tentang hal itu. *Pertama*, terjadi prifatisasi partai politik (hanya individu dan kelompok tirani modal) yang bisa membangun dan membesarkan partai politik. *Kedua*, pemberlakuan suara terbanyak dalam pemilu jelas membutuhkan dana cukup banyak dalam meraih simpati pemilih.¹⁵⁶ Begitu juga yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan Raden Adipati Surya menjadi Bupati Way Kanan, dapat dipastikan bahwa ada dana yang harus dikeluarkan untuk keperluan kemenangan selama proses pemilukada. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu partai demokrat Way Kanan tahun 2015 mengatakan bahwa:

“Jadi begini, dana yang dikeluarkan itu kan sebenarnya nggak banyak kita. Yang banyak menyedot itu kan mobilisasinya. mobilisasi Maksudnya kita pertemuan disini kan bawa orang ni, bawa orang 100 makan minum segala macam gitu kan. Nah kalau perangkat untuk kampanye itu, itu sudah ditanggung oleh negara, baner, bealbot itu segala macam kalau sudah kampanye. Tapi Cost yang keluar itu, kemarin itu, cost saat sosialisasi calon tapi dia belum ditetapkan sebagai calon. Itu yang kita nggak ngerti lah, kalau dia baner harganya 15 ribu ya kalau dia bikin baner kira-kira 20 ribu ya kelihatan lah biayanya berapa. Itu macam-macam, dari iuran anggota, anggota dewan, ada beberapa bantuan dari simpatisan, dikarenakan kalau kita bicara politik ini banyak juga yang bersimpati. Banyak juga yang nyumbang, ngebantu gitukan. Baik berupa baik tidak berupa uang, dia berupa dalam bentuk atribut, bendera, bantunya begitu gitu. Jadi makanya saya bilang, tadi saya sampaikan itu dibantu, itu dibantu. Nah itu yang tidak bisa kita kalkulasikan dengan uang, karena kita

¹⁵⁶ Ruslan Ismail Mage, Op, Cit. h. 84

nggak tau dia berapa dia pesan baner itu berapa kita nggak tau kita.”¹⁵⁷

3. Kontribusi Pada Hari Pemungutan Suara

Hari pemungutan suara adalah hari yang menentukan bagi para kandidat kepala daerah. Saat yang tenang bagi kandidat untuk menunggu hasil perhitungan suara, dan menjadi hari yang sibuk bagi penyelenggara pemilu, tim pemenangan dan seluruh perangkat yang terlibat. Namun ada jeda masa tenang dari aktivitas kampanye untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya sebelum hari pemungutan suara. Masa tenang ini biasanya dilakukan untuk melakukan kecurangan oleh tim pemenangan kandidat dengan melakukan serangan fajar atau *money politic*.

Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

“Pada saat pemilihan, ee menjelang menjelang pencoblosan itu saat masa tenang kita menginstruksikan kepada seluruh eee jaringan partai demokrat untuk melakukan, menjagalah. Menjaga jangan sampai ada ada tindakan lawan itu untuk melakukan politik uang. Dan itu udah tertangkap, beberapa kali udah tertangkap, ada upaya itu, ada upaya demikian, nah tapi kita udah nggak gubris lagi lah karena kita udah menang kan ya. Itu pertama, yang kedua semua kader partai demokrat ini harus, harus mee harus apa, yaqin bahwa pemilih itu hadir di TPS dengan tidak diteror, ditakut-takut i oleh pihak manapun dan tidak menakut-nakuti mereka begitu.”¹⁵⁸

Potensi konflik selalu ada, terutama dalam sebuah negara yang bersifat heterogen, baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi

¹⁵⁷ Deni Ribowo, Op. Cit.

¹⁵⁸ *Ibid*,

ataupun agama. Partai politik diperlukan untuk mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.¹⁵⁹ Menjaga potensi terjadinya konflik adalah bagian dari fungsi partai politik.

Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

Karenakan ee setelah setelah masa kampanye kandidat itu udah santai ada yang udah ke Jakarta, ada yang udah liburan mereka udah nggak pusing lagi, ya kan tinggal nunggu lagi udah. Karena sudah beberapa bulan kita meyakinkan masyarakat. sudah masa tenang. tapi khusus untuk partai demokrat menginstruksikan untuk menjaga situasi dibawah itu, jangan sampai ada upaya transaksi jual beli suara itu dibawah itu dan alhamdulillah karena kesigapan temen temen partai demokrat dibawah itu dan relawan dan partai pendukung itu kita bisa menghindari, menghindari dari praktek itu. Menghindari dalam artian ada beberapa yang tertangkap gitukan, tapi diproses kita tidak persoalkan juga karena mereka bilang itu ggak terbukti. Tapi itu jelas-jelas merusak dari pada kita kesal ya sudahlah, kita lakukan tindakan represif aja sendiri. Tidak percaya dengan petugas-petugas itu.¹⁶⁰

Pelaksanaan pemilukada harus disaksikan oleh saksi dari pasangan calon. Saksi tersebut harus memberikan surat mandat sebagai saksi dari pasangan calon kepada petugas KPPS.¹⁶¹ Saksi tersebut bertugas mengawasi berlangsungnya pemungutan suara, penghitungan suara dan berhak memprotes apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan mengatakan:

¹⁵⁹ Miriam Budiarmo, Op. Cit, h. 408

¹⁶⁰ Deni Ribowo, Op. Cit.

¹⁶¹ UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 89 ayat 3

“Ada, ada pelatihan saksinya. Jadi saksi itu kita ambil dari demokrat. Jadi ada 1 saksi, saksi itu kan cuman 1, yang 1 itu saksi bayangan. Itu kan sebetulnya nggak ada di undang-undang. Tapi dia ini Untuk membecek kalau saksi itu laper, jangan sampai karena dia ini leper ninggalin TPS dia makan pulang kerumah. Nah, gitu, maka 2 saksinya itu. Dan itu memang petugas partai. Intinya pada hari H itu semua petugas partai pada saat itu bergerak untuk mengamankan suara di tps masing-masing.”¹⁶²

Keberadaan saksi di hari pemungutan suara sangat dibutuhkan untuk menyaksikan segala kegiatan di hari pemungutan suara tersebut. Mulai dari pembukaan kotak suara sampai pada tahap penghitungan suara. Saksi calon berhak menerima rekapitulasi hasil perolehan suara (C1) dari petugas KPPS sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 98 ayat (18).

“Nah kemudian menjaga c1 hasil rekapitulasi itu betul-betul sudah di tandatangani atau sudah betul-betul memenuhi persyaratan undang-undang gitu. Dan c1 itu yang betul-betul harus diamankan eee karena itu kita siap untuk perkara di MK kan. Itu yang c1 berkas dokumen c1 itu yang kita amankan, ya paling itu. Intinya begini, menjaga suara aja.”¹⁶³

Perolehan suara yang diperoleh dapat mencerminkan kontribusi yang diberikan oleh partai politik. Kinerja mesin partai yang maksimal hasilnya seperti rumah siput yang mementuk pusaran semakin besar dan terus berkembang. Pada pemilu 2014 Partai Demokrat memenangkan 57 dari 227 Kampung di Kabupaten Way Kanan. Penulis membandingkan perolehan suara Partai Demokrat di 57 kampung pada pemilu legislatif 2014 dengan perolehan suara Raden Adipati Surya pada pilukada 2015

¹⁶² *Ibid*,

¹⁶³ *Ibid*,

untuk mengetahui sejauh mana kontribusi Partai Demokrat terhadap kemenangan Bupati Way Kanan.

No	Nama Kampung	Perolehan Suara Pileg	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara Pilkada	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Lebak Peniangan	564	2.024	1.102	1.957
2	Tanjung Tiga	355	1.287	649	1.243
3	Madang Jaya	310	589	448	615
4	Mulya Jaya	238	970	529	979
5	Kasui Pasar	632	2.342	1.088	2.253
6	Kampung Baru	485	663	381	583
7	Juku Kemuning	109	480	219	408
8	Gelombang Panjang	31	383	136	369
9	Tangkas	119	242	95	227
10	Bunglai	609	2.008	1.238	2.057
11	Campang Lapan	463	887	629	878
12	Kemu	169	687	531	669
13	Taman Asri	320	1.152	707	1.178
14	Campur Asri	339	1.237	921	1.234
15	Setia Negara	940	2.211	1.337	2.208
16	Gunung Katun	125	2.932	917	2.582
17	Bakti Negara	823	1.722	809	1.651
18	Cugah	537	941	664	916
19	Banjar Negara	263	885	479	714
20	Banjar Mulya	526	1.028	576	969

21	Banjar Baru	210	507	201	408
22	Way Tuba	158	642	504	650
23	Gunungpekuwon	120	216	154	190
24	Negeri Kasih	129	175	106	211
25	Gedung Jaya	293	1.066	663	1.022
26	Tulang Bawang	356	701	306	605
27	Mesir Udik	14	40	29	53
28	Punjul Agung	371	1.389	1.086	1.369
29	Suka Dana	243	1.196	709	1.126
30	Nuar Maju	330	1.035	695	997
31	Way Agung	255	76	438	819
32	Bandar Dalam	615	1.624	911	1.515
33	Penengahan	519	523	503	518
34	Karya Agung	528	866	303	866
35	Sunsang	797	1.038	991	1.197
36	Kali Papan	1.478	3.738	1.890	3.568
37	Bandar Kasih	243	577	267	496
38	Sidoarjo	619	1.512	900	1.190
39	Bumi Ratu	1.173	1.675	1.462	1.545
40	Karang Umpu	391	1.851	750	1.099
41	Sriwijaya	615	1.112	888	1.018
42	Bratha Yudha	916	1.237	1.087	1.113
43	Gedung Batin	579	884	686	786
44	Karang Agung	423	1.065	308	1.010
45	Pakuan Ratu	464	1.051	365	947

46	Gunung Cahya	112	304	128	283
47	Rumbih	604	800	486	665
48	Negara Ratu	319	490	153	478
49	Negara Sakti	557	872	294	857
50	Tanjung Agung	267	1.563	586	1.565
51	Pakuan Baru	401	1.646	1.131	1.546
52	Negara Tama	439	874	576	809
53	Way Tawar	471	980	706	981
54	Gunung Waras	362	1.068	275	826
55	Bumi Mulya	340	1.315	733	1.129
56	Karangan	630	1.113	736	1.098
57	Suka Maju	922	1.609	1.132	1.510

Sumber: Diolah oleh Penulis dari KPU Way Kanan

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 13 kampung yang memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2014 telah gagal untuk memenangkan pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony dalam pemilukada tahun 2015. Terdapat 43 kampung yang berhasil meningkatkan perolehan suara Raden Adipati Surya dan Edward Antony, serta 14 kampung justru suara Raden Adipati Surya Edward Antony justru perolehan suaranya menurun dibandingkan perolehan suara Partai Demokrat. Kegagalan tersebut menurut Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat Way Kanan tahun 2015 mengatakan bahwa:

“Penyebabnya yang pertama kalau pemilu itu ada banyak kepentingan. Kepentingan caleg. Itu akan mendongkel pengaruhnya kuat. Kalau di kampung A dan dia dekat kampung B

ini ada caleg kampung B kemudian caleg kita menang di kampung B itu hasil dari perolehan suara di kampung A. yang kemudian disaat pilkada kebetulan di kampung A ini keluarganya kandidat lawan. Contoh di kasui kan ada kandidat lawan, ada kompetitornya, ada wakilnya pak bustami. Jadi itu penyebabnya. Tapi tapi itu, memang tergantikan dengan kampung lain. Kita tau gitukan. Kalau disitu matapilihnya 800 kita hajar di yang matapilihnya 3000 gitukan. Sama aja jadi itunganya.”¹⁶⁴

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemiluakada ada jeda hari dari pelaksanaan pemungutan suara di TPS sampai dengan penetapan pemenang pemiluakada di KPU. Surat suara yang diperoleh dari TPS kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat Desa oleh PPS, dan dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK sebelum rekapitulasi akhir dan penetapan pemenang pemiluakada oleh KPU. Proses ini harus tetap diawasi karena rentan terjadi kecurangan.

Menurut Deni Ribowo selaku Ketua Bapilu partai demokrat Way Kanan tahun 2015 mengatakan bahwa:

“Ya kita kan ada saksi-saksi, saksi terutama untuk penhitungan di PPK dan sampai penghitungan di KPU. Kemrain itu termasuk demokratis pemilihanya. Karena pak Pak Bustamsi juga ee setelah pencoblosan sebelum penetapan dari KPU beliau sudah menyatakan ee mengakui bahwa Pak Adipati itu menjadi pemenang pilkada. Dan itu ya, saya pikir itu yang dilakukan beliau itu luarbiasa. Luarbiasa seperti yang luar biasa yang saya sampaikan”.¹⁶⁵

Wawancara dengan Ketua Bapilu Partai Demokrat diatas menunjukkan adanya usaha dan keterlibatan yang dilakukan Partai Demokrat untuk memberi *support*, melakukan *branding*, dan *marketing* demi kemenangan dan kesuksesan

¹⁶⁴ *Ibid*,

¹⁶⁵ *Ibid*,

pasangan Raden Adipati Surya dan Edward Antony untuk menjadi Bupati Way Kanan periode 2016-2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk-bentuk kontribusi yang diberikan oleh Partai Demokrat pada pemilu pada Way Kanan tahun 2015 yang pertama, adalah memberikan *support* dengan menjadi perahu politik untuk Raden Adipati Surya maju sebagai Bupati Way Kanan dengan 17,5 persen kursi di DPRD. Kedua, menjalankan mesin partai dengan mengerahkan kadernya untuk memasang baner bergambar Raden Adipati Surya untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Ketiga, memberikan *branding* kepada Raden Adipati Surya sebagai pemimpin yang *melayani dengan jujur*. Keempat membantu Raden Adipati Surya untuk mendapatkan dukungan politik dari partai lain dengan melakukan komunikasi politik dengan PKS, PAN, dan Partai Hanura yang kemudian terbentuk koalisi BERANI (Bersama Raden Adipati dan Edward Antoni). Kelima, memberikan sumbangan dana yang didapat dari iuran kader, anggota dewan dan simpatisan yang jumlahnya tidak dapat disebutkan, digunakan untuk sosialisasi calon sebelum penetapan calon dan akomodasi kampanye. Keenam, menjaga suara Raden Adipati Surya saat hari pemungutan suara. Ketujuh, menempatkan saksi-saksi yang sudah dilatih sebelumnya di setiap tahapan rekapitulasi suara, di TPS, PPS, BPK dan KPU.

B. Saran

Kepada penelitian selanjutnya yang mengambil penelitian sejenis terkait kontribusi partai politik dalam pelaksanaan pemilu, hendaknya tidak hanya berfokus kepada kontribusi partai yang mengusung kadernya menjadi kandidat kepala daerah, tetapi juga partai lain yang ikut berkoalisi terutama partai yang tidak menyertakan kadernya sebagai kandidat. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana partai politik terlibat dalam kemenangan pemilu atau hanya sekadar memanfaatkan dana politik yang beredar selama proses pemilu atau ada nilai-nilai yang ingin diwujudkan bersama. Kontribusi partai politik juga perlu diperhatikan setelah kandidat yang diusung berhasil memperoleh jabatan politik, apakah kinerja kepala daerah sesuai dengan visi dan misinya atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia

Arifin, Anwar, 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press.

Gregorius, Sahdan, dan Muhtar Haboddin, 2009, *Evolusi Kritis Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, Yogyakarta: IPD.

Hafsah, Muhammad Jafar, 2011, *Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Kacung, Marijan, 2006, *Demokrasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Pustaka Eureka

Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.

Khoirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, "Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Latif, Das'ad, 2018, *Pilkada Nikmat atau Berkah*, Jakarta: Gramedia. Fadjar, Abdul Mukthie, 2012, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press.

Matta, Anis, 2014, *Gelombang Ketiga Indonesia*, Jakarta: The Future Institute.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997 *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

Nawawi, Haidar, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pamungkas Sigit, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Institute democracy and Welfarism.

- Piliang, Indra J., dkk, 2003 *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Rahman, Arifin, 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktur Fungsional*, Surabaya: SIC
- Ritaudin, M. Sidi, 2015, *Etika Politik Islam*, Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
- Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia*, Bandarlampung, PKK-PUU FH UNILA
- Safa'at, M.Ali, 2001, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta:Rajawali Press
- Sardini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fajar Media Press: Yogyakarta.
- Segara, Edo, 2010, *Humas Gerakan Membangun Citra Gerakan*, (Jakarta: Muda Cendikia Publisier.
- Setiadi, Andi, 2014, *Bung Karno Marah*, Jogjakarta: Palapa
- Soemantri, Sri, 2011, *Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Persada.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Sumadi, Suryabrata, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Sutopo, H.B., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sutrisno, Hadi, 1985, *Metodelogi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Yp Fak.Psikologi UGM.
- Swara, Redaksi Puspa, 2007 *UUD 1945 & Perubahannya*, Jakarta: Puspa Swara
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Tjenreng, Zubakhrum, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Depok: Pustaka Kemang.

Yuda, Hanta, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia. Zaman, Rambe Kamaru, 2016, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* Jakarta: Mizan Publika

B. Dokumentasi

Sumber: Data KPU Way Kanan tentang Pemilu 2014

Sumber: Data KPU Way Kanan tentang Pilkada 2015

C. Jurnal

Irham, Muhammad Aqil, *Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung*, (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016)

Moh. Ali Andrias dan Tufik Nurohman, *Partai Politik Dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Tasik Malaya*, (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 1, No 3, Juli 2013

Natalia, Angga, “*Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*”. Bandar Lampung: Jurnal TAPIs Vol.11. No. 1 Januari Juni 2015

Razaqtiar, Arif Zaafril, *Peran Partai Politik Dalam Pemiliha Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyat mono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*, (Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus-Desember 2016)

Sugiarto, Bowo, dkk, *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 27, No. 3, 2014)
Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah, *Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia*, (Jurnal Legislas Indonesia Vol.11. No.3 September 2014

D. Online

Edward Apriadi, “Raden Adipati Surya Sang Berani Yang” (On-line) tersedia di: <http://edwardapriadi.blogspot.co.id/2016/09/raden-adipati-surya-sang-berani-yang.html?m=1> (09 Februari 2016)

Fajrun Najah Ahmad, "Raden Adipati Surya Pimpin Partai Demokrat Way Kanan" (On-Line) tersedia di: <http://lampung.tribunnews.com/2011/07/13/raden-adipati-surya-pimpin-partai-demokrat-waykanan> (13 Juli 2018)

Gatot Arifianto, "Dua Pasang Calon Daftar ke KPU Way Kanan" (On-Line) tersedia di: <https://lampung.antaranews.com/berita/283293/dua-pasang-calon-daftar-ke-kpu-waykanan> (28 Juli 2015)

KOMINFO Way Kanan "Profil Bupati" (On-Line) tersedia di: <http://www.waykanankab.go.id/page=konten&n017> (15 Januari 2017)

KPU Way Kanan, "Raden Adipati Surya-Edward Antony Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Terpilih", (On-line) tersedia di: <http://www.kpuwaykanan.go.id/2015/12/22/raden-adipati-surya-edward-antony-bupati-dan-wakil-bupati-waykanan-terpilih/> (22 Desember 2015)

Teras Lampung, "Anggota DPRD Way Kanan Terpilih: Demokrat dan Gerindra Raih Tuju Kursi" (On-line), tersedia di: <https://www.teraslampung.com/Anggota-dprd-way-kanan/> (14 Mei 2014)